

# KEBUDAYAAN DAN MASYARAKAT

---

Diakui secara umum bahwa kebudayaan merupakan unsur penting dalam proses pembangunan atau keberlanjutan suatu bangsa. Lebih-lebih jika bangsa itu sedang membentuk watak dan kepribadiannya yang lebih serasi dengan tantangan zamannya. Dilihat dari segi kebudayaan, pembangunan tidak lain adalah usaha sadar untuk menciptakan kondisi hidup manusia yang lebih baik. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih serasi. Menciptakan kemudahan atau fasilitas agar kehidupan itu lebih nikmat. Pembangunan adalah suatu intervensi manusia terhadap alam lingkungannya, baik lingkungan alam fisik, maupun lingkungan sosial budaya.

Pembangunan membawa perubahan dalam diri manusia, masyarakat dan lingkungan hidupnya. Serentak dengan laju perkembangan dunia, terjadi pula dinamika masyarakat. Terjadi perubahan sikap terhadap nilai-nilai budaya yang sudah ada. Terjadilah pergeseran sistem nilai budaya yang membawa perubahan pula dalam hubungan interaksi manusia di dalam masyarakatnya.

Pembangunan Nasional bertujuan untuk mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata, materiil dan spirituil berdasarkan Pancasila. Bahwa hakekat pembangunan Nasional adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia. Untuk mencapai tujuan tersebut, sudah tentu pendekatan dan strategi pembangunan hendaknya menempatkan manusia sebagai pusat intraksi kegiatan pembangunan spiritual maupun material. Pembangunan yang melihat manusia sebagai makhluk budaya, dan sebagai sumber daya dalam pembangunan. Hal itu berarti bahwa pembangunan seharusnya mampu meningkatkan harkat dan martabat manusia. Menumbuhkan kepercayaan diri sebagai bangsa. Menumbuhkan sikap hidup yang seimbang dan berkepribadian utuh. Memiliki moralitas serta integritas sosial yang tinggi. Manusia yang taqwa kepada Tuhan Yang Mahasa Esa.

Dewasa ini kita dihadapkan paling tidak kepada tiga masalah yang saling berkaitan, yaitu

- 1) Suatu kenyataan bahwa bangsa Indonesia terdiri dari suku-suku bangsa, dengan latar belakang sosio budaya yang beraneka ragam. Kemajemukan tersebut tercermin dalam berbagai aspek kehidupan. Oleh karena itu diperlukan sikap yang mampu mengatasi ikata-ikatan primordial, yaitu kesukuan dan kedaerahan.
- 2) Pembangunan telah membawa perubahan dalam masyarakat. Perubahan itu nampak terjadinya pergeseran sistem nilai budaya, penyikapan yang berubah pada anggota masyarakat terhadap nilai-nilai budaya. Pembangunan telah menimbulkan mobilitas sosial, yang diikuti oleh hubungan antar aksi yang bergeser dalam kelompok-kelompok masyarakat. Sementara itu terjadi pula penyesuaian dalam hubungan antar anggota masyarakat. Dapat dipahami apabila pergeseran nilai-nilai itu membawa akibat jauh dalam kehidupan kita sebagai bangsa.

- 3) Kemajuan dalam bidang teknologi komunikasi massa dan transportasi, yang membawa pengaruh terhadap intensitas kontak budaya antar suku maupun dengan kebudayaan dari luar. Khusus dengan terjadinya kontak budaya dengan kebudayaan asing itu bukan hanya intensitasnya menjadi lebih besar, tetapi juga penyebarannya berlangsung dengan cepat dan luas jangkauannya. Terjadilah perubahan orientasi budaya yang kadang-kadang menimbulkan dampak terhadap tata nilai masyarakat, yang sedang menumbuhkan identitasnya sendiri sebagai bangsa.

## **B. Pengertian Kebudayaan**

Secara etimologis kebudayaan berasal dari bahasa Sanskerta "*budhayah*", yaitu bentuk jamak dari budhi yang berarti budi atau akal. Sedangkan ahli antropologi yang memberikan definisi tentang kebudayaan secara sistematis dan ilmiah adalah E.B. Tylor dalam buku yang berjudul "*Primitive Culture*", bahwa kebudayaan adalah keseluruhan kompleks yang di dalamnya terkandung ilmu pengetahuan lain, serta kebiasaan yang didapat manusia sebagai anggota masyarakat. Pada sisi yang agak berbeda,

Koentjaraningrat mendefinisikan kebudayaan sebagai keseluruhan manusia dari kelakuan dan hasil kelakuan yang teratur oleh tata kelakuan yang harus didapatkannya dengan belajar dan yang semuanya tersusun dalam kehidupan masyarakat. Dari beberapa pengertian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa kebudayaan adalah keseluruhan sistem gagasan, tindakan, dan hasil karya manusia untuk memenuhi kehidupannya dengan cara belajar, yang semuanya tersusun dalam kehidupan masyarakat.

Secara lebih jelas dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Kebudayaan adalah segala sesuatu yang dilakukan dan dihasilkan manusia, yang meliputi:
  - a) kebudayaan materiil (bersifat jasmaniah), yang meliputi benda-benda ciptaan manusia, misalnya kendaraan, alat rumah tangga, dan lain-lain.
  - b) Kebudayaan non-materiil (bersifat rohaniah), yaitu semua hal yang tidak dapat dilihat dan diraba, misalnya agama, bahasa, ilmu pengetahuan, dan sebagainya.
2. Kebudayaan itu tidak diwariskan secara generatif (biologis), melainkan hanya mungkin diperoleh dengan cara belajar.
3. Kebudayaan diperoleh manusia sebagai anggota masyarakat. Tanpa masyarakat kemungkinannya sangat kecil untuk membentuk kebudayaan. Sebaliknya, tanpa kebudayaan tidak mungkin manusia (secara individual maupun kelompok) dapat mempertahankan kehidupannya. Jadi, kebudayaan adalah hampir semua tindakan manusia dalam kehidupan sehari-hari.

## **C. Unsur-Unsur Kebudayaan**

Unsur-unsur kebudayaan meliputi semua kebudayaan yang ada dunia, baik yang kecil, sedang, besar, maupun yang kompleks. Menurut konsepnya Malinowski, kebudayaan di dunia ini mempunyai tujuh unsur universal, yaitu bahasa, sistem teknologi, sistem

mata pencaharian, organisasi sosial, sistem pengetahuan, religi, dan kesenian .Seluruh unsur itu saling terkait antara yang satu dengan yang lain dan tidak bisa dipisahkan.

#### **D. Sistem Budaya dan Sistem Sosial**

Sistem sosial dan sistem budaya merupakan bagian dari kerangka budaya. Ketiga sistem tersebut secara analisis dapat dibedakan. Sistem sosial lebih banyak dibahas oleh ilmu sosiologi, sementara itu sistem budaya banyak dikaji dalam ilmu budaya. Sistem diartikan sebagai kumpulan bagian-bagian yang bekerja bersama-sama untuk melakukan suatu maksud. Sistem mempunyai sepuluh ciri, yaitu:

1. fungsi,
2. satuan,
3. batasan,
4. bentuk,
5. lingkungan,
6. hubungan,
7. proses,
8. masukan,
9. keluaran, dan
10. pertukaran.

Sistem budaya merupakan wujud yang abstrak dari kebudayaan. Sistem budaya atau kultural sistem merupakan ide-ide dan gagasan manusia yang hidup bersama dalam suatu masyarakat. Gagasan tersebut tidak dalam keadaan berdiri sendiri, akan tetapi berkaitan dan menjadi suatu sistem. Dengan demikian, sistem budaya adalah bagian dari kebudayaan yang diartikan pula adat-istiadat. Adat-istiadat mencakup sistem nilai budaya, sistem norma, norma-norma menurut pranata-pranata yang ada di dalam masyarakat yang bersangkutan, termasuk norma agama.

Fungsi sistem budaya adalah menata dan memantapkan tindakan-tindakan serta tingkah laku manusia. Proses belajar dari sistem budaya ini dilakukan melalui proses pembudayaan atau institutionalization (pelembagaan). Dalam proses ini, individu mempelajari dan menyesuaikan alam pikiran serta sikapnya dengan adat istiadat, sistem norma, dan peraturan yang hidup dalam kebudayaannya. Proses ini dimulai sejak kecil, dimulai dari lingkungan keluarga, masyarakat, mula-mula meniru berbagai macam ilmu *n*. Setelah itu menjadi pola yang mantap, dan mengatur apa yang dimilikinya.

Sedangkan, sistem sosial pertama kali diperkenalkan oleh Talcott Parsons. Konsep struktur sosial digunakan untuk menganalisis aktivitas sosial sehingga sistem sosial menjadi model analisis terhadap organisasi sosial.

Konsep sistem sosial adalah alat bantu untuk menjelaskan tentang kelompok-kelompok manusia. Model ini bertitik tolak dari pandangan bahwa kelompok manusia merupakan suatu sistem. Parsons menyusun strategi untuk menganalisis fungsional yang meliputi semua sistem sosial, termasuk hubungan berdua, kelompok kecil, keluarga, organisasi sosial, termasuk masyarakat secara keseluruhan. terdapat empat unsur dalam sistem sosial, yaitu:

1. dua orang atau lebih,
2. terjadi interaksi di antara mereka,

3. interaksi yang dilakukan selalu bertujuan, dan
4. memiliki struktur, simbol, dan harapan-harapan bersama yang dipedomannya.

Lebih lanjut, suatu sistem sosial akan dapat berfungsi apabila empat persyaratan di bawah ini terpenuhi. Keempat persyaratan itu meliputi:

1. *Adaptasi*, menunjuk pada keharusan bagi sistem-sistem sosial untuk menghadapi lingkungannya.
2. Mencapai tujuan, merupakan persyaratan fungsional bahwa tindakan itu diarahkan pada tujuan-tujuannya.
3. *Integrasi*, merupakan persyaratan yang berhubungan dengan interelasi antara para anggota dalam sistem sosial.
4. Pemeliharaan pola-pola tersembunyi, merupakan konsep latent (tersembunyi) pada titik berhentinya suatu interaksi akibat kejenuhan sehingga tunduk pada sistem sosial lainnya yang mungkin terlibat.

Lebih lanjut, Parson menjelaskan bahwa dalam suatu sistem sosial terdapat 10 unsur yang membentuk kesempurnaan suatu” sistem. Kesepuluh unsur itu, yaitu:

- 1) keyakinan,
- 2) perasaan,
- 3) tujuan sasaran cita-cita,
- 4) norma,
- 5) kedudukan peranan,
- 6) tingkatan,
- 7) kekuasaan atau pengaruh,
- 8) sanksi,
- 9) sarana atau fasilitas, dan
- 10) tekanan ketegangan.

## **E.Makna Sosial**

Manusia adalah makhluk sosial yang dapat bergaul dengan dirinya sendiri, dan orang lain menafsirkan makna-makna obyek-obyek di alam kesadarannya dan memutuskannya bagaimana ia bertindak secara berarti sesuai dengan penafsiran itu. Bahkan seseorang melakukan sesuatu karena peran sosialnya atau karena kelas sosialnya atau karena sejarah hidupnya. Tingkah laku manusia memiliki aspek-aspek pokok penting sebagai berikut :

- 1) Manusia selalu bertindak sesuai dengan makna barang-barang (*semua yang ditemui dan dialami, semua unsur kehidupan di dunia ini*);
- 2) Makna dari suatu barang itu selalu timbul dari hasil interaksi di antara orang seorang;
- 3) Manusia selalu menafsirkan makna barang-barang tersebut sebelum dia bisa bertindak sesuai dengan makna barang-barang tersebut. Atas dasar aspek-aspek pokok tersebut di atas, interaksi manusia bukan hasil sebab-sebab dari luar. Hubungan interaksi manusia memberikan bentuk pada tingkah laku dalam kehidupannya sehari-hari, bergaul saling mempengaruhi. Mempertimbangkan tindakan orang lain perlu sekali, bila mau membentuk tindakan sendiri.

Menurut Blumer dalam premisnya menyebutkan bahwa manusia bertindak terhadap sesuatu berdasarkan makna-makna yang berasal dari interaksi sosial seseorang dengan orang lain dan disempurnakan pada saat proses interaksi sosial berlangsung.

Makna dari sesuatu berasal dari cara-cara orang atau aktor bertindak terhadap sesuatu dengan memilih, memeriksa, berpikir, mengelompokkan dan mentransformasikan situasi di mana dia ditempatkan dan arah tindakannya.

## **F. Perubahan Sosial**

Setiap masyarakat pasti mengalami perubahan-perubahan sesuai dengan dimensi ruang dan waktu. Perubahan itu bisa dalam arti sempit, luas, cepat atau lambat. Perubahan dalam masyarakat pada prinsipnya merupakan proses terus-menerus untuk menuju masyarakat maju atau berkembang, pada perubahan sosial maupun perubahan kebudayaan.

Menurut Moore dalam karya Lauer, perubahan sosial didefinisikan sebagai perubahan penting dalam struktur sosial. Yang dimaksud struktur sosial adalah pola-pola perilaku dan interaksi sosial. Perubahan sosial mencakup seluruh aspek kehidupan sosial, karena seluruh aspek kehidupan sosial itu terus menerus berubah, hanya tingkat perubahannya yang berbeda.

Himes dan More mengemukakan tiga dimensi perubahan sosial :

- 1) Dimensi structural dari perubahan sosial mengacu kepada perubahan dalam bentuk struktur masyarakat menyangkut perubahan peran, munculnya peranan baru, perubahan dalam struktur kelas sosial dan perubahan dalam lembaga sosial;
- 2) Perubahan sosial dalam dimensi cultural mengacu kepada perubahan kebudayaan dalam masyarakat seperti adanya penemuan dalam berpikir (ilmu pengetahuan), pembaharuan hasil teknologi, kontak dengan kebudayaan lain yang menyebabkan terjadinya difusi dan peminjaman kebudayaan;
- 3) Perubahan sosial dalam dimensi interaksional mengacu kepada perubahan hubungan sosial dalam masyarakat yang berkenaan dengan perubahan dalam frekuensi, jarak sosial, saluran, aturan-aturan atau pola-pola dan bentuk hubungan.

## **G. Konsep Nilai**

Batasan nilai bisa mengacu pada berbagai hal seperti minat, kesukaan, pilihan, tugas, kewajiban agama, kebutuhan, keamanan, hasrat, keengganan, daya tarik, dan hal-hal lain yang berhubungan dengan perasaan dari orientasi seleksinya (Pepper, dalam Sulaeman, 1998). Rumusan di atas apabila diperluas meliputi seluruh perkembangan dan kemungkinan unsur-unsur nilai, perilaku yang sempit diperoleh dari bidang keahlian tertentu, seperti dari satu disiplin kajian ilmu. Di bagian lain, Pepper mengatakan bahwa nilai adalah segala sesuatu tentang yang baik atau yang buruk. Sementara itu, Perry (dalam Sulaeman, 1998) mengatakan bahwa nilai adalah segala sesuatu yang menarik bagi manusia sebagai subjek.

Ketiga rumusan nilai di atas, dapat diringkas menjadi segala sesuatu yang dipentingkan manusia sebagai subjek, menyangkut segala sesuatu yang baik atau yang buruk sebagai abstraksi, pandangan, atau maksud dari berbagai pengalaman dengan seleksi perilaku yang ketat.

Seseorang dalam melakukan sesuatu terlebih dahulu mempertimbangkan nilai. Dengan kata lain, mempertimbangkan untuk melakukan pilihan tentang nilai baik dan buruk adalah suatu keabsahan. Jika seseorang tidak melakukan pilihannya tentang nilai, maka orang lain atau kekuatan luar akan menetapkan pilihan nilai untuk dirinya.

Seseorang dalam melakukan pertimbangan nilai bisa bersifat subyektif dan bisa juga bersifat objektif. Pertimbangan nilai subyektif terdapat dalam alam pikiran manusia dan bergantung pada orang yang memberi pertimbangan itu. Sedangkan pertimbangan objektif beranggapan bahwa nilai-nilai itu terdapat tingkatan-tingkatan sampai pada tingkat tertinggi, yaitu pada nilai fundamental yang mencerminkan universalitas kondisi fisik, psikologi sosial, menyangkut keperluan setiap manusia di mana saja.

Dalam kajian filsafat, terdapat prinsip-prinsip untuk pemilihan nilai, yaitu sebagai berikut.

- 1) nilai instrinsik harus mendapat prioritas pertama daripada nilai ekstrinsik. Sesuatu yang berharga instrinsik, yaitu yang baik dari dalam dirinya sendiri dan bukan karena menghasilkan sesuatu yang lain. Sesuatu yang berharga secara ekstrinsik, yaitu sesuatu yang bernilai baik karena sesuatu hal dari luar. Jika sesuatu itu merupakan sarana untuk mendapat sesuatu yang lain. Semua benda yang bisa digunakan untuk aktivitas mempunyai nilai ekstrinsik.
- 2) nilai ini tidak harus terpisah. Suatu benda dapat bernilai instrinsik dan ekstrinsik. Contoh pengetahuan, mempunyai nilai instrinsik baik dari dirinya sendiri dan mempunyai nilai ekstrinsik apabila digunakan untuk kepentingan pembangunan baik di bidang ekonomi, politik, hukum, maupun bidang-bidang yang lainnya.
- 3) nilai yang produktif secara permanen didahulukan daripada nilai yang produktif kurang permanen. Beberapa nilai, seperti nilai ekonomi akan habis dalam aktivitas kehidupan. Sedangkan nilai persahabatan akan bertambah jika dipergunakan untuk membagi nilai akal dan jiwa bersama orang lain. Oleh karena itu, nilai persahabatan harus didahulukan daripada nilai ekonomi.

## **H. Sistem Nilai**

Sistem nilai adalah nilai inti (*core value*) dari masyarakat. Nilai inti ini diakui dan dijunjung tinggi oleh setiap manusia di dunia untuk berperilaku. Sistem nilai ini menunjukkan tata-tertib hubungan timbal balik yang ada di dalam masyarakat. Sistem nilai budaya berfungsi sebagai pedoman tertinggi bagi kelakuan manusia (Koentjaraningrat, 1981). Sistem nilai budaya ini telah melekat dengan kuatnya dalam jiwa setiap anggota masyarakat sehingga sulit diganti atau diubah dalam waktu yang singkat. Sistem budaya ini menyangkut masalah-masalah pokok bagi kehidupan manusia.

Sistem nilai budaya ini berupa abstraksi yang tidak mungkin sama persis untuk setiap kelompok masyarakat. Mungkin saja nilai-nilai itu dapat berbeda atau bahkan bertentangan, hanya saja orientasi nilai budayanya akan bersifat universal, sebagaimana Kluckhohn (1950) sebutkan.

Menurut Kluckhohn, sistem nilai budaya dalam masyarakat di mana pun di dunia ini, secara universal menyangkut lima masalah pokok kehidupan manusia, yaitu:

- 1) *Hakikat hidup manusia*. Hakikat hidup untuk setiap kebudayaan berbeda secara ekstrim. Ada yang berusaha untuk memadamkan hidup (nirvana = meniup habis). Ada pula yang dengan pola-pola kelakuan tertentu menganggap hidup sebagai sesuatu hal yang baik (mengisi hidup).
- 2) *Hakikat karya manusia*. Setiap manusia pada hakikatnya berbeda-beda, di antaranya ada yang beranggapan bahwa karya bertujuan untuk hidup, karya memberikan kedudukan atau kehormatan, karya merupakan gerak hidup untuk menambah karya lagi.
- 3) *Hakikat waktu untuk setiap kebudayaan berbeda*. Ada yang berpandangan mementingkan orientasi masa lampau, ada pula yang berpandangan untuk masa kini atau yang akan datang.
- 4) *Hakikat alam manusia*. Ada kebudayaan yang menganggap manusia harus mengeksploitasi alam atau memanfaatkan alam semaksimal mungkin, ada pula kebudayaan yang beranggapan bahwa manusia harus harmonis dengan alam dan manusia harus menyerah kepada alam.
- 5) *Hakikat hubungan manusia*. Dalam hal ini ada yang mementingkan hubungan manusia dengan manusia, baik secara horisontal maupun secara vertikal kepada tokoh-tokoh. Ada pula yang berpandangan individualist's (menilai tinggi kekuatan sendiri).

Berdasarkan hasil suatu penelitian, ada tiga pandangan dasar tentang makna hidup, yaitu:

- 1) hidup untuk bekerja,
- 2) hidup untuk beramal, berbakti, dan
- 3) hidup untuk bersenang-senang.

Sedangkan makna kerja, yaitu:

- 1) untuk mencari nafkah,
- 2) untuk memper-tahankan hidup,
- 3) untuk kehormatan,
- 4) untuk kepuasan dan kesenangan, dan
- 5) untuk amal ibadah.

## **I. Perubahan Kebudayaan**

Masyarakat dan kebudayaan di mana pun selalu dalam keadaan berubah, ada dua sebab perubahan

- 1) Sebab yang berasal dari masyarakat dan lingkungannya sendiri, misalnya perubahan jumlah dan komposisi

- 2) sebab perubahan lingkungan alam dan fisik tempat mereka hidup. Masyarakat yang hidupnya terbuka, yang berada dalam jalur-jalur hubungan dengan masyarakat dan kebudayaan lain, cenderung untuk berubah secara lebih cepat.
- 3) adanya difusi kebudayaan, penemuan-penemuan baru, khususnya teknologi dan inovasi.

Dalam masyarakat maju, perubahan kebudayaan biasanya terjadi melalui penemuan (*discovery*) dalam bentuk ciptaan baru (*inovation*) dan melalui proses difusi. *Discovery* merupakan jenis penemuan baru yang mengubah persepsi mengenai hakikat suatu gejala mengenai hubungan dua gejala atau lebih. *Invention* adalah suatu penciptaan bentuk baru yang berupa benda (pengetahuan) yang dilakukan melalui penciptaan dan didasarkan atas pengkom-binasian pengetahuan-pengetahuan yang sudah ada mengenai benda dan gejala yang dimaksud.

Ada empat bentuk peristiwa perubahan kebudayaan. Pertama, *cultural lag*, yaitu perbedaan antara taraf kemajuan berbagai bagian dalam kebudayaan suatu masyarakat. Dengan kata lain, *cultural lag* dapat diartikan sebagai bentuk ketinggalan kebudayaan, yaitu selang waktu antara saat benda itu diperkenalkan pertama kali dan saat benda itu diterima secara umum sampai masyarakat menyesuaikan diri terhadap benda tersebut.

Kedua, *cultural survival*, yaitu suatu konsep untuk meng-gambarkan suatu praktik yang telah kehilangan fungsi pentingnya seratus persen, yang tetap hidup, dan berlaku semata-mata hanya di atas landasan adat-istiadat semata-mata. Jadi, *cultural survival* adalah pengertian adanya suatu cara tradisional yang tak mengalami perubahan sejak dahulu hingga sekarang.

Ketiga, pertentangan kebudayaan (*cultural conflict*), yaitu proses pertentangan antara budaya yang satu dengan budaya yang lain. Konflik budaya terjadi akibat terjadinya perbedaan kepercayaan atau keyakinan antara anggota kebudayaan yang satu dengan yang lainnya.

Keempat, guncangan kebudayaan (*cultural shock*), yaitu proses guncangan kebudayaan sebagai akibat terjadinya perpindahan secara tiba-tiba dari satu kebudayaan ke kebudayaan lainnya. Ada empat tahap yang membentuk siklus *cultural shock*, yaitu: (1) tahap inkubasi, yaitu tahap pengenalan terhadap budaya baru, (2) tahap kritis, ditandai dengan suatu perasaan dendam; pada saat ini terjadi korban *cultural shock*, (3) tahap kesembuhan, yaitu proses melampaui tahap kedua, hidup dengan damai, dan (4) tahap penyesuaian diri; pada saat ini orang sudah membanggakan sesuatu yang dilihat dan dirasakan dalam kondisi yang baru itu; sementara itu rasa cemas dalam dirinya sudah berlalu.

### **Pengertian Kebudayaan**

- Menurut *E.B. Taylor (1871)*, Kebudayaan adalah kompleks yang mencakup pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat istiadat,
- Menurut *Selo Sumarjan dan Soelaeman Soemardi* merumuskan kebudayaan sebagai semua hasil karya, rasa dan cipta masyarakat



- Menurut *Sutan Takdir Alisyahbana*, Kebudayaan adalah manifestasi dari cara berpikir.
- Menurut *Koentjaraningrat*, Kebudayaan adalah keseluruhan gagasan dan karya manusia yang harus dibiasakannya dengan belajar beserta keseluruhan dari hasil budi pekertinya,
- Menurut *A.L. Krober* dan *C. Kluckhohn*, bahwa kebudayaan adalah manifestasi atau penjelmaan kerja jiwa manusia dalam arti seluas-luasnya.
- Menurut *C.A. Van Peursen* mengatakan bahwa kebudayaan sebagai manifestasi kehidupan setiap orang, dan kehidupan setiap kelompok orang-orang berlainan dengan hewan-hewan, maka manusia tidak hidup begitu saja ditengah alam, melainkan selalu mengubah alam
- *Krober* dan *Kluckhohn*,kebudayaan terdiri atas berbagai pola, bertingkah laku mantap, pikiran, perasaan dan reaksi yang diperoleh dan terutama diturunkan oleh simbol-simbol yang menyusun pencapaiannya secara tersendiri dari kelompok-kelompok manusia, termasuk di dalamnya perwujudan benda-benda materi, pusat esensi kebudayaan terdiri atas tradisi dan cita-cita atau paham, dan terutama keterikatan terhadap nilai-nilai.

### Unsur- Unsur Kebudayaan

- Menurut *Melville J. Herkovits* mengajukan pendapatnya tentang unsur kebudayaan adalah terdiri dari 4 unsur yaitu : alat teknologi, sistem ekonomi, keluarga dan kekuatan politik
- Menurut *Bronislaw Malinowski* unsur kebudayaan terdiri dari sistem norma, organisasi ekonomi, alat-alat atau lembaga ataupun petugas pendidikan dan organisasi kekuatan
- Menurut *C. Kluckhohn* ada tujuh unsur kebudayaan universal yaitu :Sistem religi, Sistem organisasi kemasyarakatan, Sistem pengetahuan,Sistem mata pencaharian hidup dan sistem ekonomi, Sistem teknologi dan peralatan, Bahasa, Kesenian.

### Orientasi Nilai Budaya

Kebudayaan sebagai karya manusia memiliki sistem nilai, menurut *C. Kluckhohn* dalam karyanya ***variations in value orientation*** (1961) sistem nilai budaya dalam semua kebudayaan di dunia, secara *universal* menyangkut lima masalah pokok kehidupan manusia, yaitu:

1. Hakekat hidup manusia: hakekat hidup untuk setiap kebudayaan berbeda secara ekstern. Ada yang berusaha untuk memadamkan hidup, ada pula dengan pola-pola kelakuan tertentu.
2. Hakekat karya manusia: setiap kebudayaan hakekatnya berbeda-beda, untuk hidup, kedudukan/kehormatan, gerak hidup untuk menambah karya.
3. Hakekat waktu manusia: hakekat waktu untuk setiap kebudayaan berbeda, orientasi masa lampau atau untuk masa kini.

4. Hakekat alam manusia: ada kebudayaan yang menganggap manusia harus mengeksploitasi alam, ada juga yang harus harmonis dengan alam atau manusia menyerah kepada alam.
5. Hakekat hubungan manusia: mementingkan hubungan antar manusia baik vertikal maupun horizontal (orientasi pada tokoh-tokoh). Ada pula berpandangan individualistis

### **Perubahan Kebudayaan**

Terjadinya gerak perubahan kebudayaan ini disebabkan oleh :

- Sebab-sebab yang berasal dari dalam masyarakat dan kebudayaan sendiri misalnya: perubahan jumlah dan komposisi penduduk
- Sebab-sebab perubahan lingkungan alam dan fisik tempat mereka hidup

### **Faktor Yang Mempengaruhi Diterima Atau Tidaknya Suatu Unsur Kebudayaan Baru, Diantaranya :**

- Terbatasnya masyarakat memiliki hubungan atau kontak dengan kebudayaan dan dengan orang-orang yang berasal dari luar masyarakat tersebut
- Pandangan hidup dan nilai-nilai yang dominan dalam suatu kebudayaan ditentukan oleh nilai-nilai agama
- Corak struktur sosial suatu masyarakat turut menentukan proses penerimaan kebudayaan baru
- Suatu unsur kebudayaan diterima jika sebelumnya sudah ada unsur-unsur kebudayaan yang menjadi landasan bagi diterimanya unsur kebudayaan yang baru tersebut
- Apabila unsur baru itu memiliki skala kegiatan yang terbatas, dan dapat dengan mudah dibuktikan kegunaannya *oleh warga masyarakat* yang bersangkutan.

### **Kaitan Manusia Dan Kebudayaan**

Proses dialektis ini tercipta melalui tiga tahap yaitu :

- *Eksternalisasi*, proses dimana manusia mengekspresikan dirinya dengan membangun dunianya;
- *Obyektivasi*, proses dimana masyarakat menjadi realitas obyektif, yaitu suatu kenyataan yang terpisah dari manusia dan berhadapan dengan manusia,
- *Internalisasi*, proses dimana masyarakat disergap kembali oleh manusia. Maksudnya bahwa manusia mempelajari kembali masyarakatnya sendiri agar dia dapat hidup dengan baik.

# BELAJAR MENJADI MASYARAKAT YANG DEWASA: Aku yang Bertransendensi

---

**Karlina Supelli**

Memilih tema seperti ini berarti mengandaikan bahwa masyarakat memang mengalami sebuah proses belajar sekaligus proses pertumbuhan dan perkembangan. Sejarah masyarakat memang adalah cerita tentang perkembangan. Di dalam perkembangan itu satu-satunya yang pasti adalah masa lampau, sedangkan masa depan senantiasa tanpa batas, tak terpastikan, dan terbuka. Masa lampau memberikan keterikatan kepada yang sudah pasti dan dengan begitu rasa aman, sementara masa depan menjanjikan kebebasan namun penuh ketidakpastian. Satu-satunya yang pasti dari masa depan adalah kematian itu sendiri.

Maka setiap saat manusia hidup di dalam kecemasan-kecemasan dan kehendak akan rasa aman. Namun justru karena itulah problem eksistensi manusia menjadi unik di dalam keseluruhan alam. Ia tidak pernah menerima alam dan lingkungannya sebagaimana adanya. Ia akan mengambil jarak, menilai masa lalu sehingga dapat mengantisipasi masa depannya.

Sejarah kebudayaan manusia, baik sebagai individu ataupun masyarakat, adalah sebuah proses belajar besar, dan pada abad ke 18, filsuf Jerman kenamaan Immanuel Kant menuliskan bahwa salah satu ciri khas kebudayaan terdapat di dalam kemampuan manusia untuk mengajar dirinya sendiri. Ia senantiasa berada dalam keharusan menemukan langkah keluar untuk problem yang dihadapi, menemukan jalan-jalan baru untuk eksistensinya.

\*\*\*

Dengan andaian di atas saya mencoba untuk menjawab pertanyaan, mengapa pada pagi hari ini kita semua diajak untuk bersama-sama merenungkan tema Belajar Menjadi Masyarakat yang Dewasa? Apakah karena sepanjang lebih dari setahun ini kita dihenyakkan ke dalam kenyataan pahit bahwa sebagai masyarakat di satu pihak, sesungguhnya kita belum menunjukkan kedewasaan dalam kehidupan bersama, dan sebagai nasion belum menunjukkan kematangan bernegara?

Mengerikan memang, apa yang terjadi di sekitar kita justru sebagai sebuah negara merdeka Indonesia akan memasuki usia yang ke-54 dalam beberapa hari ini. Konflik berdarah di banyak tempat, baik yang bersifat horisontal rakyat dengan rakyat maupun yang bersifat vertikal negara dengan rakyat, seperti menjadi cermin tercabik-cabiknya kemanusiaan. Atas nama persatuan dan kesatuan bangsa, alat negara dapat membunuh warga negaranya sendiri, dan atas nama identitas arkaik sesama warga dapat saling membunuh dengan teramat keji.

Akal budi, yang telah menjadi sumber kekuatan yang memilah manusia dari kesatuan asalnya dengan alam sehingga manusia meninggalkan tahap eksistensinya sebagai binatang, seperti lumpuh menghadapi kehendak dahsyat untuk mengikuti naluri instinktif hewani yang tak terkendali. Dari kenyataan di sekitar kita tinggal sekalipun, kita menjadi saksi bagaimana manusia menempatkan diri di atas kehidupan, dan menghancurkannya.

Saya ingin kembali sebentar ke proses perkembangan manusia individual untuk mendapatkan analogi mengenai kedewasaan sebuah masyarakat. Ketika lahir ke dunia, seorang bayi belum menyadari akan adanya realitas di luar diri luar kecuali bahwa dunia luar ada untuk memberinya kehangatan dan rasa kenyang. Dengan kata lain dunia luar ada untuk semata-mata memenuhi kebutuhan dirinya. Sigmund Freud menamakan keadaan ini sebagai *narcissisme primer*.

Kesadaran akan adanya dunia luar datang perlahan-lahan dengan munculnya kemampuan membedakan adanya aku dan engkau, yaitu ketika sang bayi mulai menyadari bahwa ada benda-benda atau orang-orang yang berbeda-beda. Itulah sebabnya proses penamaan menjadi sangat penting karena mengartikan adanya diri sendiri yang terpisahkan dari obyek lain di luar diri yang mempunyai nama berbeda.

Dalam perkembangan berikutnya, di dalam diri anak akan tumbuh kesadaran bahwa orang-orang lain di sekitarnya juga mempunyai kebutuhan yang sama penting seperti kebutuhannya sendiri. Di sini kesadaran anak menjadi terbuka, intersubjektif, yang bergantung kepada hubungannya dengan orang lain. Jika ini gagal, maka anak tidak mampu menghadapi realitas dunia sebagai mana adanya, tetapi akan selalu membentuk realitas berdasarkan proses batinnya sendiri.

Seketika anak berhasil melepaskan ikatan primer dengan ibu, atau dalam skala besar ketika manusia berhasil melepaskan diri dari kungkungan alam, ia mengembangkan kebutuhan akan identitas. Ia mencoba menjadi aku yang utuh. Semakin dewasa seorang anak, semakin ia menjadi aku yang utuh, yang mampu membuat pilihan-pilihan bebas.

Dalam sejarah kebudayaan, aku utuh tercapai ketika tahap mitis beralih menjadi tahap ontologis. Ini dicirikan dengan kemampuan manusia membuat jarak dengan alam dan menjadikan alam sebagai obyek, dan aku sebagai subyek. Dalam hubungan sosial, ini tercapai ketika individu berhasil melepaskan diri dari ikatan kelompok sehingga identitasnya tidak lagi ditentukan oleh identitas kelompok asal usulnya. Nama tidak lagi merupakan pertalian dengan kelompok asal usul sehingga ia tidak kehilangan nama sekalipun pertalian itu putus. Seseorang tidak lagi hanya diterima sebagai eksistensi sejauh ia bertalian dengan kelompok tertentu.

Bagaimanapun, pemilahan *aku* dengan dunia seperti ini jarang terjadi. Selalu muncul kecenderungan untuk berada bersama. Manusia ada karena hubungannya dengan orang lain. Maka, umumnya aku hanya merasakan diri sebagai aku jika aku diterima di dalam sebuah kelompok. Seorang anak remaja dapat saja bersedia untuk melakukan apapun sejauh ia dapat diterima di sebuah kelompok. Orang yang lebih dewasa dari segi umur merelakan cita-cita, gagasan-gagasan ideal, dilepas demi penerimaan di sebuah kelompok.

Keinginan hebat menjadi anggota sebuah kelompok menjadi penting bukan hanya demi terpenuhinya kepentingan-kepentingan tertentu, tetapi juga demi diperolehnya rasa aman. Kebangsaan, agama, suku, etnisitas, menolong orang merasa mempunyai identitas.

Jika kita kembali melihat berbagai konflik yang terjadi di Indonesia dalam setahun terakhir ini, apapun pemicunya, selalu dapat ditarik sebuah pola sejenis. Hampir semua konflik massal horizontal yang terjadi sepanjang setahun terakhir ini, senantiasa mengambil bentuk pembangkitan sentimen atas dasar identitas kelompok atau yang ingin saya sebut sebagai *arkaisme asal usul*, *archaism of the origin*, meminjam istilah pemikir feminis Julia Kristeva.

Arkaisme asal usul ini menggambarkan perasaan yang sangat eksklusif terhadap identitas homogen berdasarkan satuan kelompok keagamaan, kesukuan, kedaerahan, kebahasaan, atau

etnisitas. Arkaisme ini begitu kuat mengacu ke dalam sehingga hampir semua yang berada di luar kelompok dan berbeda identitas asal usul akan ditolak, dan menjadi yang lain, the other.

Dalam konteks masyarakat, tidak ada yang salah dengan arkaisme asal usul seperti ini, kecuali ketika gagal bertransendensi ke aras nasion serta gagal berpijak di atas nilai-nilai kemanusiaan. Pada saat itu muncul bahaya akan kesombongan eksklusif kelompok yang akan menjadikan kepentingan kelompok sebagai pusat.

Keadaan ini diperparah dengan meluasnya ketidakadilan struktural untuk waktu yang amat lama sepanjang sejarah orde baru, bahkan sampai saat ini, yang menyebabkan masyarakat terbelah dalam kelompok yang diuntungkan atau dirugikan oleh berbagai kebijakan penguasa. Dalam keadaan ini pemenuhan kebutuhan untuk berinteraksi dengan orang lain, untuk memiliki identitas, diperoleh dengan cara yang sebetulnya menghilangkan kemandirian dan keutuhan akunya. Orang sekedar mencari kesamaan identitas untuk kemudian menentukan setiap “yang lain” sebagai yang potensial untuk setiap saat dijadikan musuh.

\*\*\*

Dari uraian singkat di atas terlihat bahwa jika pertumbuhan individu hendak dijadikan acuan, maka pertama-tama adalah kesadaran akan adanya orang lain di luar aku yang bukan sekedar pemuas kebutuhanku adalah ciri seseorang memasuki tahap pertumbuhan pertama. Kesadaran bahwa aku hadir dalam dunia, dalam sebuah realitas yang bukan aku sendiri yang berhak menamakannya, tetapi realitas yang aku miliki bersama dengan orang lain. Aku melampaui dunia rekaanku.

Selanjutnya adalah kemampuan menentukan identitas tanpa kehilangan kemandirian dan integritas; identitas yang tidak ilusif, yang tidak membuatnya semakin bergantung kepada kelompok. Identitas itu bukan yang mengembalikannya kepada asal usul homogen. Aku melampaui semua bentuk identitas arkaik dan memilih identitas dengan mendasarkannya di atas pengalaman akan daya-daya pribadi yang memberinya kekuatan untuk menentukan sendiri pilihan-pilihan sosial, politik, bahkan ekonomi dan budayanya. Kemampuan ini sekaligus membuka diri untuk menerima yang lain, yang berbeda, sebagai sebuah identitas utuh di luar dirinya yang juga mempunyai pilihan-pilihan bebas. Di sinilah terbuka ruang-ruang untuk menerima keragaman.

\*\*\*

Uraian yang mengacu ke pertumbuhan individu di atas diharapkan tidak akan mengecoh dengan mengarahkan kesimpulan bahwa masyarakat yang menjalani tahap pertumbuhannya dengan berhasil menuju kedewasaan adalah yang ditopang oleh individu-individu yang matang. Ini akan membawa kepada pertanyaan klasik yang tak akan diperdebatkan di sini, tetapi justru ingin dilampaui lewat sebuah dialektika yang mengacu kepada sebuah slogan feminis the personal is political.

Saya ingin menyampaikan hal ini untuk tidak hanya berhenti pada ciri masyarakat dewasa, tetapi justru memenuhi tema, yaitu belajar. Ini berarti mengajukan sebuah metode, sebuah cara belajar. Saya memilih *consciousness raising* (CR), yang dalam pandangan feminis telah berhasil menghadirkan kembali perempuan tanpa identitas untuk ikut menamakan kembali dunia. Alasannya adalah karena saya melihat bahwa keadaan masyarakat yang sekarang ini menjadi demikian memprihatinkan tidak dapat dilepaskan sama sekali dari struktur-struktur kekuasaan yang opresif selama jangka waktu yang panjang.

Untuk itu harus dipahami bahwa ada dua cara melihat manusia. Secara tradisional, di satu pihak ada gagasan filosofis yang secara ontologis melihat manusia dengan kesadaran dan kapasitas kreatifnya merupakan makhluk yang berdiri sendiri lepas dari struktur eksistensi lainnya. Dengan demikian secara epistemologis manusia diasumsikan sebagai pengkonstruksi realitas di sekitarnya. Ini berarti bahwa realitas sosial dan semua bentuk pengetahuan ada di dalam kepala melalui pengalaman personal; realitas sosial adalah hasil bentukan.

Di lain pihak, ada gagasan yang secara ontologis melihat manusia, sekalipun memiliki kesadaran dan kapasitas kreatif yang menjadikannya manusia, adalah bagian dari struktur eksistensi di sekitarnya, baik yang kongret maupun abstrak. Struktur obyektif di luar diri inilah yang bekerja dan mempengaruhi kesadarannya. Realitas sosial bersifat eksternal, di atas dan melampaui individu, terdiri dari struktur-struktur kongret yang mempunyai pengaruh deterministik terhadap perkembangan kesadaran individu.

Pendekatan pertama menjadi dasar untuk pendekatan humanisme radikal di dalam kebudayaan, sedangkan yang kedua menjadi dasar untuk pendekatan strukturalisme radikal.

Apakah yang menjadi dasar untuk CR? Dasarnya adalah pernyataan Carol Hannisch (1970), *the is personal is political*, yang ia ajukan dalam *Notes of the Second Year*. Slogan ini kemudian juga menjadi sebuah metode analisis yang dikembangkan oleh para feminis untuk memperoleh pemahaman politik berdasarkan analisis kritis terhadap pengalaman personal perempuan. Namun demikian CR dapat menjadi sebuah proses pendewasaan anggota masyarakat dengan memakai medium berupa dialog dalam kelompok-kelompok diskusi, baik yang bersifat publik maupun tertutup, dengan atau tidak dengan fasilitator. CR umumnya dilakukan sebagai bagian dari metode pendampingan terhadap korban, apapun definisi korban itu, apakah individu, atau kelompok.

Salah satu implikasi dari penerapan premis *the personal is political* adalah bahwa proses pendampingan, atau jika dalam hal pembicaraan di sini hendak disebut sebagai proses pembelajaran, menjadi sesuatu yang disadari mempunyai sasaran politis untuk mengubah struktur-struktur kekuasaan yang telah mengakibatkan munculnya berbagai bentuk tekanan di dalam masyarakat.

Secara individual, di dalam proses CR, orang dihadapkan kepada kenyataan bagaimana tekanan bekerja atas diri melalui pendekatan baik dari dalam dan dari luar diri. Dialog yang menjadi medium untuk melaksanakan kegiatan tersebut berlangsung untuk menyingkapkan realitas subyektif orang per orang, dan dari situ bersama-sama menamakan kembali kebenaran.

CR menjadi rekonstitusi kritis mengenai makna pengalaman seseorang. Pengalaman tersebut didefinisikan kembali di dalam bahasa politis, sambil menekankan kembali hubungan antara kondisi material obyektif di lapangan dan pengalaman personal subyektif.

Pemahaman mengenai alasan politis di belakang tindakan opresif dan upaya meletakkannya ke dalam perspektif yang lebih luas daripada sekedar penderitaan personal, menyebabkan peserta CR yang menjadi korban ketidakadilan struktural misalnya, tidak menuding diri sendiri—sebagaimana banyak terjadi—sebagai penyebab tekanan yang menimpa dirinya.

Maka, selain mengandung di dalamnya gagasan bahwa mengubah seseorang merupakan prasyarat awal untuk mengubah masyarakat—dan dengan begitu jatuh ke pendekatan dalam kerangka besar humanisme radikal—CR justru bermaksud menohok secara radikal kerangka kekuasaan yang menyebabkan ketidakadilan terjadi, sehingga memungkinkan penuntutan atas

keadilan. Dengan ini, CR melibatkan proses sekaligus pendekatan yang subyektif dan yang obyektif.

Proses ini berjalan sebagai dialektika yang berfungsi sebagai pembawa gerak sebuah predikat—dalam hal ini masyarakat—ke level kesadaran yang lebih tinggi.

Di dalam gerak itu terkandung sintesis antara penghancuran dan penyelamatan menuju ke pembangkitan (*aufheben*, dalam bahasa Hegel). Anggota masyarakat bergerak dari korban yang dihancurkan dan dinegasikan menjadi mereka yang memiliki kesadaran baru di dalam dirinya mengenai hubungan antara pengalaman pribadi yang menyakitkan dan sumber tekanan yang bersifat struktural, dan bagaimana letaknya di dalam konteks tatanan sosial dan politik yang berlaku.

\*\*\*

Pembelajaran dalam bentuk ini menyuguhkan pemahaman mengenai hubungan antara metode dan penyingkapan kebenaran serta antara anggota masyarakat sebagai individu dan kondisi sosial-politik yang berjalan di sekitarnya. Maka kebenaran bukan lagi sesuatu yang transendental. Kebenaran adalah kepemahaman akan kekinian yang tersembunyi di dalam anggota masyarakat, khususnya mereka yang menjadi korban tekanan dan kekerasan, dan menunggu untuk disingkapkan.

Dalam proses ini pendewasaan masyarakat berlangsung bukan semata-mata mengandalkan pendekatan individual kultural sehingga jika terjadi kekerasan masyarakat maka individu dipersalahkan, tidak juga dengan semata-mata mengandalkan perbaikan struktural tempat perasaan subyektif personal tidak pernah mendapat tempat. Namun bagaimana setiap individu menyadari bahwa ia adalah hasil dialektika masyarakat yang ikut ia bentuk, sekaligus membentuk dirinya.

### **Kepustakaan:**

1. Collins, B., 1986, "Defining Feminist Social Work" dalam *Social Work* 31.
2. MacKinnon, C., 1982, "Feminism, Marxism, Method, and the State: An Agenda for Theory" dalam *Sign: Journal of Women in Culture and Society*, 7.7.
3. van Peursen, 1989, *Strategi Kebudayaan*, Kanisius.
4. Grosz, E., 1990, *Jacques Laqan: A Feminist Introduction*, Routledge.
5. Eitinger, L., 1980, "The Concentration Camp Syndrome and Its late Sequelae" dalam *Survivors, Victims, and Perpetrators* (ed. J.E. Dimsdale), Hemisphere.

# Nasionalisme dan Kebudayaan

---

Oleh: Ignas Kleden

DALAM sejarah politik Indonesia, nasionalisme rupa-rupanya pernah dianggap bertentangan dengan kebudayaan. Dalam arti itu, antropolog Clifford Geertz umpamanya menulis panjang-lebar tentang primordial sentiments dan national integration. Diambil secara gampang, apa yang dinamakan sentimen primordial adalah perasaan-perasaan yang erat hubungannya dengan kebudayaan, khususnya dengan faktor-faktor yang dianggap given dalam kebudayaan, seperti hubungan darah, kesamaan daerah, kesamaan asal-usul, bahasa ibu, atau warna kulit. Dalam istilah sosiologi, kebudayaan dianggap memberikan segala yang ascribed, yaitu apa saja yang menjadi atribut seseorang atau tempat seseorang diperanggotakan, tanpa pilihan yang aktif dan sadar dari yang bersangkutan. Seseorang menjadi Jawa atau Sunda bukan karena pilihannya, tetapi semata-mata karena askripsi. Sebaliknya, nasionalisme dan integrasi nasional adalah pemikiran, perasaan dan perjuangan yang penuh kesadaran dan pilihan, yang menuntut usaha yang sungguh-sungguh dan harus dikelompokkan ke dalam apa yang dalam jargon sosiologi Parsonian dinamakan *achievement* (sebagai lawan dari *ascription*).

Dalam arti tersebut, keterlibatan seseorang atau sekelompok orang dalam integrasi nasional dianggap mengharuskan adanya pengorbanan terhadap hal-hal yang bersifat primordial. Hal ini dalam praktiknya bukan tidak dijalankan dalam politik Indonesia. Bahasa ibu (*vernacular*) dianggap kurang penting dibandingkan dengan bahasa nasional, dan hal itu tercermin dengan jelas dalam pengajaran bahasa di sekolah-sekolah, di mana (dengan beberapa pengecualian) bahasa ibu tidak diajarkan lagi. Demikian pun rasa kedaerahan yang berlebih-lebihan dianggap membahayakan persatuan nasional. Provinsialisme bukanlah unsur kuat dalam nasionalisme, tetapi diperlakukan sebagai risikonya.

Dalam kaitan itu, istilah kebudayaan nasional menjadi istilah yang penuh kontroversi dan ketidakjelasan. Selain bahasa nasional, sastra Indonesia, seni lukis Indonesia, seni tari dengan koreografi baru yang nontradisional, teater modern di Indonesia, pendidikan dan pengajaran nasional, dan media massa Indonesia, sulit bagi kita menunjukkan secara empiris apa saja yang menjadi unsur-unsur kebudayaan nasional.

Menurut pengalaman selama ini, kebudayaan nasional lebih merupakan gagasan (atau bahkan retorika) politik, daripada suatu konsep yang dapat diuraikan secara ilmiah. Dengan mudah suatu tindakan pada masa lalu dianggap bertentangan dengan nilai-nilai kebudayaan nasional, tetapi tidak pernah dijelaskan nilai-nilai mana saja yang dapat diterima sebagai sistem-nilai kebudayaan nasional. Seperti biasanya, istilah politik lebih mudah berfungsi sebagai antikonsep, yang dapat diterapkan secara arbitrer apabila dibutuhkan secara politik, daripada sebagai suatu kerangka konseptual yang jelas batas-batasnya dan dapat dideskripsikan unsur-unsurnya. Apakah ada upacara perkawinan nasional? Apakah ada jenis makanan nasional? Apakah ada pencak silat nasional? Hal-hal terakhir ini lebih mudah diidentifikasi sebagai produk budaya suatu daerah atau suatu kelompok etnik tertentu.

\*\*\*



KESULITAN tersebut muncul dari sifat khas nasionalisme yang tumbuh dan berkembang di Indonesia, dan di banyak negara berkembang lainnya. Di negeri-negeri ini nasionalisme telah lahir sebagai gerakan untuk menentang dan mengakhiri suatu pemerintahan dan kekuasaan kolonial. Yang terjadi adalah adanya bangsa yang merdeka mendahului lahirnya suatu negara yang berdaulat. Dalam kenyataannya sering terjadi bahwa sekalipun bangsa itu telah merdeka, negara yang diproklamasikan oleh bangsa tersebut tetap meneruskan watak dari negara kolonial sebelumnya. Nasionalisme jenis ini sangat berbeda dari nasionalisme di negara-negara Eropa di mana beberapa negara modern terbentuk mendahului adanya bangsa.

Sebelum menyingsingnya fajar masa modern, di Eropa Barat telah terbentuk negara-negara yang relatif berdaulat, seperti negara Perancis, Inggris, Spanyol, dan Belanda, yang kemudian menjelma menjadi bangsa pada saat memasuki masa modern. Perubahan negara menjadi bangsa di tempat-tempat tersebut menjadi mantap pada masa-masa setelah Perang Napoleon (1804-1815). Di negara-negara ini dapatlah dikatakan, kesatuan negara mendahului kesatuan bangsa. Varian lainnya adalah Jerman dan Italia, di mana kesatuan budaya di negeri itu jauh lebih dahulu ada dan baru kemudian mendapatkan ekspresi politisnya. Dengan lain perkataan, di kedua negara yang tersebut terakhir ini tidak ada masalah dengan kebudayaan nasional seperti halnya di Indonesia, karena kesatuan budaya jauh mendahului kesatuan politik. Kebudayaan Jerman dan kebudayaan Italia sudah mantap pembentukannya sebelum terbentuknya bangsa Jerman atau bangsa Italia.

\*\*\*

Di Indonesia, yang terjadi adalah bahwa pembentukan bangsa itu berlangsung melalui pergerakan nasional dan mendahului pembentukan negara RI maupun pembentukan kebudayaan nasional Indonesia. Ada dua akibat yang sangat terasa sampai sekarang.

Dari satu segi, negara Indonesia merdeka harus berusaha (dengan tidak selalu berhasil) melepaskan diri dari sifat-sifat negara kolonial yang mendahuluinya, baik negara kolonial Belanda maupun negara kolonial Jepang. Orientasi utama ke pasar luar negeri dalam ekonomi misalnya, merupakan warisan langsung dari negara kolonial Hindia Belanda. Demikian pun, peranan besar militer dalam bidang sosial-politik dalam masa Orde Baru adalah salah satu warisan pemerintahan Jepang. Dari pihak lainnya, kebudayaan Indonesia harus didefinisikan dalam hubungan dengan kebudayaan daerah maupun kebudayaan asing.

Dalam undang-undang dikatakan bahwa kebudayaan nasional terdiri dari puncak-puncak kebudayaan daerah. Definisi ini memang sangat kabur, karena tidak dibedakan kebudayaan daerah yang dihasilkan sebelum terbentuknya negara Indonesia Merdeka, dan kebudayaan daerah yang diciptakan setelah tercapainya kemerdekaan nasional. Sutan Takdir Alisjahbana misalnya, dalam Polemik Kebudayaan dengan tegas menolak semua hasil kebudayaan yang telah tercipta sebelum kemerdekaan sebagai kebudayaan Indonesia. Dalam arti itu, Borobudur paling banter hanya dapat diterima sebagai produk kebudayaan pra-Indonesia, tetapi bukan bagian kebudayaan nasional, karena dia diciptakan pada saat belum ada sama sekali kesadaran tentang ke-Indonesia-an.

Demikian pula, kebudayaan nasional dicoba dikonsepsikan dalam perbedaan, dan bahkan pertentangannya dengan kebudayaan Barat. Ketakutan terhadap kebudayaan Barat sebagai ancaman bagi kebudayaan nasional muncul dengan nyata, baik dalam masa pemerintahan

Soekarno maupun dalam masa pemerintahan Soeharto. Tetapi, apa yang sebetulnya dinamakan kebudayaan Barat oleh kedua penguasa itu?

Soekarno memang menolak musik rock 'n roll, tetapi membaca dengan lahap kepustakaan politik, filsafat, dan sejarah kebudayaan Barat. Soeharto menolak oposisi dalam politik sebagai refleksi kebudayaan Barat, tetapi dengan tangan terbuka menerima modal-modal asing yang sebagian terbesar berasal dari negara-negara Barat. Anehnya, sikap bermusuhan terhadap kebudayaan asing ini hanya ditujukan kepada apa yang dibayangkan sebagai kebudayaan Barat, sedangkan kebudayaan Cina, Parsi, India, dan kebudayaan luar lainnya tidak dianggap sebagai kebudayaan asing.

\*\*\*

Sekalipun Indonesia sejak awal mendengungkan semboyan Bhinneka Tunggal Ika, namun jelas bahwa persatuan merupakan ide yang dominan, yang telah muncul dari nasionalisme yang bersifat antikolonial. Perjuangan nasional itu diandaikan mengharuskan adanya persatuan nasional, yaitu persatuan semua kelompok etnik di Nusantara ke dalam bangsa Indonesia, dan juga suatu negara kesatuan yang tidak mengijinkan adanya kedaulatan lain di samping kedaulatan RI dalam batas-batas teritorial negara ini.

Sadar-tak-sadar, ide negara kesatuan dan persatuan bangsa ini kemudian menggiring pemikiran ke arah kebudayaan nasional, yang dalam bentuk konkretnya berarti kebudayaan persatuan. Tetapi, persatuan secara budaya merupakan hal yang tidak mudah, karena menimbulkan pertanyaan: mengapa kebudayaan-kebudayaan harus dipersatukan, dan kalau dipersatukan, maka persatuan kebudayaan itu mengikuti pola yang mana? Dalam hal inilah kelihatan sikap yang serba mendua dalam politik Indonesia, yang tentu saja telah muncul dari desakan politik yang ada, yang kemudian harus dijawab secara pragmatis belaka, tanpa mempertimbangkan implikasi budayanya.

Persoalan asimilasi kelompok etnik Tionghoa merupakan contoh soal yang baik, bahwa suatu kelompok budaya dan kelompok etnis yang dianggap asing diminta untuk meninggalkan kebudayaannya sendiri dan bergabung dengan kelompok budaya yang lebih besar. Atau, dalam bahasa antropologi budaya, kebudayaan kelompok etnik Tionghoa harus diperlakukan sebagai subkultur dari suatu dominant culture yang lain, entah Jawa, Batak, atau Sunda. Persoalan ini tentu saja menyangkut masalah dwi-kewarganegaraan orang-orang keturunan Tionghoa yang pernah muncul, yang kemudian dipertegas oleh masalah sikap nasional Indonesia terhadap komunisme. Dengan demikian, persoalan asimilasi bukanlah persoalan kebudayaan, tetapi persoalan politik semata-mata, karena penduduk Timur asing lainnya, seperti keturunan Arab atau India, tidak diminta melakukan asimilasi, karena tidak ada urgensi politik yang mengharuskannya.

\*\*\*

Kebudayaan Indonesia saat ini sedang menghadapi masalah bangkitnya kebudayaan-kebudayaan daerah, entah karena berakhirnya etatisme dan sentralisme Orde Baru, maupun karena penerapan Otonomi Daerah berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 22 Tahun 1999 dan UU Nomor 25 Tahun 1999. Diberikannya hak-hak pemerintahan yang besar kepada daerah (kabupaten) jelas memungkinkan daerah bersangkutan menghidupkan

kebudayaan lokal yang menjadi ciri daerah tersebut. Apakah hidupnya budaya daerah ini kemudian semakin menunjang atau menghalangi proses demokratisasi, harus dilihat nanti.

Kalau kebudayaan daerah itu semakin memperkuat feodalisme lokal atau mengembalikan lagi patriarki yang dibenarkan oleh adat-istiadat setempat, maka hidupnya kebudayaan lokal membawa tantangan dan risiko baru untuk demokratisasi. Sebaliknya, kalau munculnya kebudayaan daerah itu memungkinkan pluralisasi ekspresi-ekspresi budaya, yang menjadi representasi dari kesadaran nasional yang sama atas cara yang lebih beragam, maka kita akan mengalami suatu masa di mana kebangsaan dan kebudayaan tidak saling menghambat, tetapi justru saling memperkaya.

Gerakan untuk otonomi daerah, tuntutan untuk kesamaan hak hidup budaya kaum minoritas sebagaimana diperjuangkan dalam gerakan-gerakan multikultural, menguatnya filsafat politik komunitarian di Amerika Serikat sebagai antitesa yang kuat terhadap demokrasi liberal, hidupnya kembali lokalitas sebagai *countervailing movement* terhadap superimposisi yang keras dari proses globalisasi, jelas akan ada pengaruhnya terhadap nasionalisme dan rasa kebangsaan. Bangkitnya negara-negara berbasis etnis di Eropa Timur dan bekas daerah kekuasaan Uni Soviet menjadi pratanda bahwa yang akan kita hadapi di masa depan barangkali bukanlah *the clash of civilizations* sebagaimana diramalkan Samuel Huntington, tetapi sangat mungkin *the clash of nationalities* yang didukung oleh identifikasi kebudayaan yang kuat.

## **Ignas Kleden**

Sosiolog

# PEMBENTUKAN KEBUDAYAAN NASIONAL INDONESIA

---

## I. PENDAHULUAN

Keanekaragaman budaya yang ada di Indonesia harus dipandang sebagai sebuah kekayaan bukan kemiskinan. Bahwa Indonesia tidak memiliki identitas budaya yang tunggal bukan berarti tidak memiliki jati diri, namun dengan keanekaragaman budaya yang ada membuktikan bahwa masyarakat kita memiliki kualitas produksi budaya yang luar biasa, jika mengacu pada pengertian bahwa kebudayaan adalah hasil cipta manusia.

Kebudayaan atau budaya menurut Bapak Antropologi Indonesia, Koenjtaraningrat (1996), adalah keseluruhan sistem gagasan, tindakan dan hasil karya manusia dalam rangka kehidupan masyarakat yang dijadikan milik diri manusia dengan belajar. Pengertian tersebut merujuk pada gagasan J. J Honigmann (1973) tentang wujud kebudayaan atau disebut juga "gejala kebudayaan". Honigmann membagi kebudayaan kedalam tiga wujud, yakni kebudayaan dalam wujud ide, pola tindakan dan artefak atau benda-benda.

Mengacu pada konsep diatas, jika dikembalikan pada realita yang ada di kehidupan bangsa Indonesia, kiranya kita bisa memilah setiap wujud kebudayaan yang ada, minimal dari yang kita temui setiap harinya. Sejalan dengan itu, kemudian akan muncul pertanyaan klasik "apakah ada yang namanya budaya Indonesia?"

Ada beberapa budaya besar (bukan dalam konteks baik dan buruk) yang terkait dan selalu dikaitkan dengan kebudayaan Indonesia dalam pencariannya, yakni istilah budaya timur, dominasi sebuah budaya lokal dan pengaruh Islam sebagai agama mayoritas. Pengaitan itu pada dasarnya bukan mengarah kepada pencarian jawaban atas apa yang dimaksud dengan kebudayaan nasional, tetapi lebih cenderung menjadi sesuatu yang dipaksakan sebagai turunan dari kepentingan ideologis, yang kemudian mengatasmakan integrasi nasional.

Makalah ini akan membahas tentang proses terbentuknya kebudayaan Indonesia dimulai dari awal keberadaan kebudayaan Indonesia, pluralisme masyarakat dan proses pembentukan kebudayaan Indonesia.

## II. PEMBENTUKAN KEBUDAYAAN INDONESIA

Kebudayaan atau culture adalah keseluruhan pemikiran dan benda yang dibuat atau diciptakan oleh manusia dalam perkembangan sejarahnya. Ruth Benedict (1934) melihat kebudayaan sebagai pola pikir dan berbuat yang terlihat dalam kehidupan sekelompok manusia dan yang membedakannya dengan kelompok lain. Para ahli umumnya sepakat bahwa kebudayaan adalah perilaku dan penyesuaian diri manusia berdasarkan hal-hal yang dipelajari/*learning behavior*. Kebudayaan juga dapat dipahami sebagai suatu sistem ide/gagasan yang dimiliki suatu masyarakat lewat proses belajar dan dijadikan acuan tingkah laku dalam kehidupan sosial bagi masyarakat tersebut (Koentjaraningrat, 1996). Sedangkan sistem budaya sendiri dapat dikatakan sebagai seperangkat pengetahuan yang meliputi pandangan hidup, keyakinan, nilai, norma, aturan, hukum yang diacu untuk menata, menilai, dan menginterpretasikan benda dan peristiwa dalam berbagai aspek kehidupannya. Nilai-nilai yang menjadi salah satu unsur sistem budaya, merupakan konsepsi abstrak yang

dianggap baik dan amat bernilai dalam hidup, yang kemudian menjadi pedoman tertinggi bagi kelakuan dalam suatu masyarakat.

Bertitik tolak dari pemahaman tersebut, konsep kebudayaan Indonesia dibangun oleh para pendahulu kita. Konsep kebudayaan Indonesia disini mengacu kepada nilai-nilai yang dipahami, dianut, dan dipedomani bersama oleh bangsa Indonesia. Nilai-nilai inilah yang kemudian dianggap sebagai nilai luhur, sebagai acuan pembangunan Indonesia. Nilai-nilai itu antara lain adalah taqwa, iman, kebenaran, tertib, setia kawan, harmoni, rukun, disiplin, harga diri, tenggang rasa, ramah tamah, ikhtiar, kompetitif, kebersamaan, dan kreatif. Nilai-nilai itu ada dalam sistem budaya etnik yang ada di Indonesia. Nilai-nilai tersebut dianggap sebagai puncak-puncak kebudayaan daerah, sebagaimana sifat/ciri khas kebudayaan suatu bangsa Indonesia (Melalatoa, 1997: 102). Konsep kebudayaan Indonesia ini kemudian diikat dalam satu konsep persatuan dan kesatuan bangsa yaitu konsep Bhineka Tunggal Ika.

kebudayaan tidak bisa hanya dilihat dari sisi isi kebudayaan itu sendiri karena keberadaannya tidak terlepas dari banyak faktor lain sehingga kebudayaan itu ada, berlangsung, dan berkembang. Satu faktor penting yang berkaitan dengan kebudayaan adalah masyarakat, tidak akan ada satu kebudayaan tanpa masyarakat, demikian sebaliknya. Sebagai satu bentuk persekutuan hidup, masyarakat itu sendiri adalah konsep dengan dimensi yang luas; meski kita sering menggunakan konsep masyarakat Indonesia, namun dalam kenyataannya kita tidak bisa membayangkan semua orang Indonesia yang berjumlah ratusan juta orang, biasanya yang terbayang hanyalah sekelompok orang-orang Indonesia di sekitar kita saja, di suatu lokasi tertentu. Seorang ahli sosiologi Indonesia, M. M. Djodjodigono (1965), membedakan antara konsep „masyarakat dalam arti luas“ dan „masyarakat dalam arti sempit“; dalam konsep itu, masyarakat Indonesia adalah masyarakat dalam arti luas, dan masyarakat disekeliling kita apakah itu desa atau kota tertentu, maupun masyarakat warga kelompok kekerabatan seperti *marga*, *dadia*, atau *suku bangsa* adalah masyarakat dalam arti sempit.

Satu bentuk keberadaan lain dari masyarakat dalam dimensi yang lebih luas yaitu dalam bentuk bangsa, sepertinya keanekaragaman kebudayaan itu lebih memungkinkan keberadaannya dalam lingkungan masyarakat yang lebih luas; bangsa Indonesia pantas disebut sebagai bangsa yang besar karena memang memiliki potensi untuk menjadi besar, tidak saja ditunjang oleh kewilayahan membentang luas, jumlah penduduk yang besar, namun juga sarat dengan keanekaragaman masyarakat dan kebudayaan yang berbeda satu dengan yang lain, mungkin hanya perbedaan ras saja yang tidak terlalu menyolok dari keanekaragaman di atas.

Secara teoritis sebenarnya sangat sulit untuk mempersatukan berbagai kepentingan yang berbeda dalam satu pedoman nilai yang dijadikan sebagai acuan bersama, masing-masing tinggal di daerah yang berbeda, mempunyai tradisi dan kebiasaan yang berbeda, kebudayaan berbeda, dengan bahasa yang berbeda. Dengan menempuh perjalanan sejarah yang panjang dan melelahkan bangsa Indonesia yang mulanya terdiri dari bangsa-bangsa yang kecil seolah-olah telah dirancang untuk selalu bersama dalam menempuh suka dan duka, sama-sama menanggung derita dibawah dominasi kekuasaan bangsa asing, dan sama-sama berjuang untuk membebaskan diri dari dominasi tersebut, membuat segenap warga yang hidup di sebaran kepulauan Indonesia merasa sebagai satu kesatuan; lahir, tumbuh, dan

berkembangnya bangsa Indonesia adalah hasil kesejarahan, keadaan inilah yang menjadi salah satu potensi terbesar dimiliki dari keberadaan bangsa Indonesia. Agaknya tidak ada satu bangsa pun di dunia ini yang dapat mengimbangi kebersatuan dari kebhinekaan yang ada seperti yang terjadi di Indonesia ini; kalau ada orang yang menganggap dirinya sebagai bagian dari masyarakat Indonesia tentu ia akan bangga dengan keadaan ini, dan bila ada yang berbeda dengan itu, patut dipertanyakan warga masyarakat mana dia ?

Keadaan inilah yang menjadi tantangan kita , sebagai warga masyarakat Indonesia sedini mungkin kita harus menyadari arti suatu kehidupan bersama; kita tidak bisa hidup sendiri, kita senantiasa memerlukan orang lain untuk saling bekerja sama - dengan siapapun kita hidup. Terkadang orang lupa atau sengaja melupakan tentang keberadaan dirinya bila dihubungkan dengan orang lain, mereka hanya ingat apa yang seharusnya orang lain berikan pada kita, bukan apa yang seharusnya kita berikan pada orang lain; atau dengan kata lain orang akan selalu ingat tentang fasilitas dan hak dan cenderung mengabaikan apa yang menjadi tugas atau kewajibannya.

### **III. Kebudayaan Indonesia: Suatu Proses Awal**

#### **3.1. Timbulnya Rasa Persatuan Bangsa**

Indonesia mempunyai sejarah tertulis yang dimulai sejak abad ke-4 M. Pada dasarnya, penduduk Indonesia dianggap terdiri dari masyarakat dengan kebudayaan –kebudayaan sukubangsa lokal yang hanya sedikit berhubungan satu dengan yang lain. Ketika kepulauan nusantara menjadi satu bagian yang integral dalam perdagangan Asia, dengan rute perdagangan yang merentang dari Asia Barat Daya dan Asia Selatan ke Tiongkok, dan ketika pada abad ke-4 dan ke-5 rempah-rempah dari kepulauan Indonesia, seperti merica, cengkeh dan pala, menjadi komoditi penting dalam ekonomi dunia kuno, keterlibatan dalam perdagangan rempa-rempah meningkatkan mobilitas antarpulau di kalangan penduduk nusantara. Mereka yang tinggal di daerah-daerah strategis dalam jaringan perdagangan antarpulau, seperti Sulawesi Selatan, pantai timur dan barat Pulau Jawa, Sumatra Selatan, Malaka dan Aceh, kemudian tampaknya menjadi negara-negara atau kerajaan-kerajaan dagang kecil. Tergantung keadaan, mereka mungkin telah mengalami persaingan keras namun merupakan negara-negara tetangga yang bekerja sama pula. Negara-negara ini terpusat pada kota-kota pelabuhan, dan pada umumnya tidak memiliki daerah pedalaman yang luas maupun penduduk yang padat. Namun negara- negara tersebut mempunyai armada dagang yang besar, yang terdiri dari perahu-perahu bercadik dan dilengkapi dengan layar lebar.

Koentjaraningrat (1993) mengemukakan sekurangnya ada tiga keadaan dalam sejarah nasional di atas yang menggambarkan kesatuan antara negara-negara kecil tersebut yang di masa lalu tidak terlibat konflik antar sukubangsa, dan menyebabkan bangsa Indonesia dan para pemimpin mereka selalu mengacunya dengan tujuan untuk meningkatkan integrasi sukubangsa dan kesatuan nasional masa kini.

1. Dua buah kerajaan Indonesia telah mempersatukan secara sosial ekonomi (mungkin juga politik) negara-negara kecil yang sebelumnya saling bersaing, ialah kerajaan Sriwijaya pada abad ke-7 m dan 8 M, yang pusatnya di Sumatra Selatan, dan kerajaan Majapahit pada abad ke-14 M yang berpusat di Jawa Timur.

2. Seluruh rakyat Indonesia telah mengalami dominasi kolonial kerajaan Belanda dari negara Eropa selama tiga setengah abad, suatu kenyataan yang memberikan mereka rasa penderitaan yang sama.

3. Selama pergerakan nasional untuk kemerdekaan antara tahun 1920-an sampai dengan 1930-an, pemuda Indonesia telah menolak menonjolkan isu kesukubangsaan; dan pada tahun 1928 memilih bahasa dari satu sukubangsa kecil, yaitu bahasa *Melayu*, dan bukan bahasa-bahasa dari sukubangsa Jawa yang penduduknya paling besar. Pada tanggal 28 Oktober 1928 para perwakilan segenap masyarakat Indonesia yang menyatakan diri sebagai pemuda indoensia yang berikrar sebagai satu bangsa : bangsa Indonesia; satu tanah air : tanah air Indonesia; satu bahasa : bahasa Indonesia.

### **3.2. Persebaran Masyarakat dan Budaya di Indonesia**

Keadaan geografis yang membagi wilayah Indonesia atas kurang lebih 3.000 pulau yang tersebar disuatu daerah ekuator sepanjang kurang lebih 3.000 mil dari timur ke barat dan lebih dari 1.000 mil dari utara ke selatan, merupakan faktor yang sangat besar pengaruhnya terhadap terciptanya pluralitas sukubangsa di Indonesia. Ketika nenek moyang bangsa Indonesia yang sekarang ini mula-mula sekali datang secara bergelombang sebagai emigran dari daerah yang sekarang kita kenal sebagai daerah Tiongkok Selatan pada kira-kira 2.000 tahun sebelum masehi, keadaan geografis serupa itu telah memaksa mereka untuk harus tinggal menetap di daerah yang terpisah-pisah satu sama lain.

Isolasi geografis yang demikian di kemudian hari mengakibatkan penduduk yang menempati setiap pulau atau sebagian dari suatu pulau di Nusantara ini tumbuh menjadi kesatuan sukubangsa yang sedikit banyak terisolasi dari kesatuan sukubangsa yang lain. Tiap kesatuan sukubangsa terdiri dari sejumlah orang yang dipersatukan oleh ikatan-ikatan emosional, serta memandang diri mereka masing-masing sebagai suatu jenis tersendiri. Dengan perkecualian yang sangat kecil, mereka pada umumnya memiliki bahasa dan warisan kebudayaan yang sama. Lebih daripada itu, mereka biasanya mengembangkan kepercayaan bahwa mereka memiliki asal-usul keturunan yang sama, satu kepercayaan yang seringkali di dukung oleh mitos-mitos yang hidup di dalam masyarakat.

Tentang berapa jumlah sukubangsa yang sebenarnya ada di Indonesia, ternyata terdapat berbagai-bagai pendapat yang tidak sama di antara para ahli ilmu kemasyarakatan. Hidred Geertz (1981), misalnya, menyebutkan adanya lebih dari 300 sukubangsa di Indonesia, masing-masing dengan bahasa dan identitas kultural yang berbeda. Skinner, menyebutkan adanya lebih dari 35 sukubangsa menurut kajian induk bahasa dan adat yang tidak sama. Van Vollenhoven (1926), mengemukakan sekurangnya ada 19 daerah pemetaan menurut hukum adat yang berlaku walaupun angka-angka tersebut dimaksudkan untuk menggambarkan keadaan pada puluhan tahun yang lalu; akan tetapi dengan perkiraan bahwa angka kelahiran dan angka kematian selama ini memiliki rata-rata yang sama bagi kebanyakan sukubangsa yang ada di Indonesia, maka angka-angka tersebut di atas barangkali masih dapat menggambarkan keadaan masa kini.

### **3.3. Pengaruh Budaya Asing**

Akulturası adalah perubahan besar yang terjadi dalam kebudayaan sebagai akibat adanya kontak antar kebudayaan yangberlangsung lama. Hal itu terjadi apabila ada kelompok-

kelompok yang memiliki kebudayaan berbeda saling berhubungan secara langsung dan intensif. Hal tersebut mengakibatkan timbulnya perubahan-perubahan besar pada pola kebudayaan pada salah satu kelompok atau keduanya. Perubahan kebudayaan akibat adanya proses akulturasi tidak mengakibatkan perubahan total pada kebudayaan yang bersangkutan, hal ini disebabkan karena ada unsur-unsur kebudayaan yang masih bertahan, masyarakatpun ada yang menerima sebagian atau mengadakan penyesuaian dengan unsur-unsur kebudayaan yang baru. Sejarah panjang perjalanan hidup masyarakat Indonesia ditandakan dengan banyaknya berhubungan dengan masyarakat asing seperti Cina, India, Persia, Portugis, Inggris, Belanda, dan Jepang; keberadaan mereka ternyata banyak meninggalkan unsur-unsur kebudayaan yang kemudian beberapa darinya diadopsikan dalam budaya lokal.

#### **a. Pengaruh India (Hindu – Budha).**

Pengaruh yang pertama kali menyentuh masyarakat Indonesia berupa pengaruh kebudayaan Hindu dan Budha dari India sejak 400 tahun sebelum masehi. Hinduisme dan Budhisme, pada waktu itu tersebar meliputi daerah yang cukup luas di Indonesia, serta lebur bersama-sama dengan kebudayaan asli yang telah lama hidup. Namun demikian terutama di pulau Jawa dan pulau Bali pengaruh agama Hindu dan Budha itu tertanam dengan kuatnya sampai saat ini. Cerita seperti *Mahabharata* atau *Ramayana* sangat populer sampai sekarang, bahkan pada beberapa sukubangsa seperti Sunda, Jawa, atau Bali, pengaruh cerita-cerita itu sudah dianggap sebagai bagian atau ciri dari kebudayaannya; beberapa film Indonesia ternyata banyak yang berorientasi pada sifat-sifat film India, yaitu antara bernyanyi dan menari; musik *dangdut* yang demikian populer untuk lapisan masyarakat tertentu, bisa dikatakan berakar dari kebudayaan India. Pengaruh yang paling menonjol dari agama Hindu bisa ditemukan pada masyarakat Bali, walaupun ada sedikit-sedikit perbedaan karena tentunya unsur budaya asli masih dipertahankan, namun pengaruh agama Hindu tertanam kuat pada kepercayaan masyarakat Bali.

#### **b. Pengaruh Kebudayaan Islam**

Pengaruh kebudayaan Islam mulai memasuki masyarakat Indonesia sejak abad ke 13, akan tetapi baru benar-benar mengalami proses penyebaran yang meluas sepanjang abad ke 15. Pengaruh agama Islam terutama memperoleh tanah tempat berpijak yang kokoh di daerah-daerah di mana pengaruh agama Hindu dan Budha tidak cukup kuat. Di daerah Jawa tengah dan Jawa Timur, dimana pengaruh agama Hindu dan Budha telah tertanam dengan cukup kuat, suatu kepercayaan keagamaan yang bersifat *sincretic* dianut oleh sejumlah besar penduduk di kedua daerah tersebut, dimana kepercayaan animisme-dinamisme bercampur dengan kepercayaan agama Hindu, Budha dan Islam. Pengaruh reformasi agama Islam yang memasuki Indonesia pada permulaan abad ke 17 dan terutama pada akhir abad ke 19 itupun tidak berhasil mengubah keadaan tersebut, kecuali memperkuat pengaruh agama Islam di daerah-daerah yang sebelumnya memang telah merupakan daerah pengaruh agama Islam. Sementara itu Bali masih tetap merupakan daerah pengaruh agama Hindu.

Harsoyo (1999) menyebutkan bahwa praktik penyebaran agama Islam itu melalui dua proses, yaitu melalui mekanisme perniagaan yang dilakukan oleh orang-orang India dari Gujarat dan orang-orang Persia, dan yang kedua melalui penguasaan sentra-sentra kekuasaan di pulau Jawa oleh orang-orang Pribumi yang telah memeluk agama Islam;



dengan proses yang cukup rumit ini tidak mengherankan kalau kemudian terdapat beberapa perbedaan proses penyerapan agama Islam ini di Indonesia. Untuk orang-orang yang tinggal di daerah pesisir agak berbeda dengan orang-orang yang tinggal di pedalaman; untuk orang-orang yang telah kuat memeluk agama Hindu dan Budha agak berbeda dengan orang-orang yang lebih longgar darinya; untuk yang menerimanya dari orang-orang Gujarat agak berbeda dengan pengaruh Persia; bahkan menurut seorang peneliti Amerika tentang kebudayaan-kebudayaan di Indonesia, Clifford Geertz (1982), keberadaan agama Islam pada suatu masyarakat Jawa Tengah itu dilaksanakan menurut tiga lapisan masyarakat, yaitu agama Islam yang hidup pada kelompok bangsawan yang disebutnya sebagai *Priyayi*, Islam yang hidup pada kelompok rakyat kebanyakan yang disebutnya sebagai *Abangan*, dan Islam yang hidup pada anggota-anggota kelompok pesantren sebagai pusat pengkajian agama Islam yang disebut *Santri*.

### **c. Pengaruh Kebudayaan Barat.**

Pengaruh kebudayaan Barat mulai memasuki masyarakat Indonesia melalui kedatangan bangsa Portugis pada permulaan abad ke 16, kedatangan mereka ke tanah Indonesia ini karena tertarik dengan kekayaan alam berupa rempah-rempah di daerah kepulauan Maluku, rempah-rempah ini adalah sebagai barang dagangan yang sedang laku keras di Eropa pada saat itu. Kegiatan misionaris yang menyertai kegiatan perdagangan mereka, dengan segera berhasil menanamkan pengaruh agama Katolik di daerah tersebut. Ketika bangsa Belanda berhasil mendesak bangsa Portugis untuk meninggalkan Indonesia pada sekitar tahun 1600 M, maka pengaruh agama Katolik pun segera digantikan oleh pengaruh agama Protestan. Namun demikian, sikap bangsa Belanda yang lebih lunak di dalam soal agama jika dibandingkan dengan bangsa Portugis, telah mengakibatkan pengaruh agama Protestan hanya mampu memasuki daerah-daerah yang sebelumnya tidak cukup kuat dipengaruhi oleh agama Islam dan agama Hindu, sekalipun bangsa Belanda berhasil menanamkan kekuasaan politiknya tidak kurang selama 350 tahun lamanya di Indonesia.

Dalam proses kontak antara unsur-unsur budaya yang satu dan budaya yang lain, terjadilah saling mempengaruhi (interaksi) antara kebudayaan itu, dalam proses interaksi itulah akan timbul permasalahan tentang perubahan kebudayaan, yaitu makin melemahnya nilai-nilai budaya sendiri. Begitu juga apabila interaksi dengan budaya asing sangat kuat padahal sebenarnya tidak sesuai dengan kepribadian budaya bangsa kita. Dalam konteks modernisasi, suatu keadaan yang sarat dengan peniruan gaya hidup asing, karena orang ingin disebut modern maka mereka tidak segan-segan untuk meniru gaya hidup masyarakat Barat, walau mungkin untuk sebagian besar masyarakat nilai-nilainya dianggap bertentangan.

## **4. Pluralisme Masyarakat dan budaya Indonesia**

### **4.1 . Bangsa Indonesia**

Persekutuan hidup yang dikenal sebagai bangsa (*nation*) adalah suatu ikatan solidaritas dan loyalitas antar sesama anggota yang terdiri atas sejumlah besar pelaku yang menganggap diri dan dianggap mewakili suatu persekutuan hidup tertentu, apapun ras, sukubangsa, agama, ideologi politik, dan kewarganegaraannya. Dalam kenyataannya, tidak semua orang yang dianggap orang Indonesia memang menganggap diri orang Indonesia dan sebaliknya; tidak semua orang yang menganggap diri orang Indonesia dianggap orang Indonesia oleh

semua orang Indonesia lain. Keadaan demikianlah yang mengakibatkan adanya masalah persatuan dan kesatuan Indonesia.

Konsep Indonesia sendiri, sebenarnya mengacu kepada konsep bangsa negara/ *nation-state*. Konsep bangsa (*nation*) merupakan konsep yang berada diantara konsep negara dan masyarakat. Konsep bangsa dibangun atas dasar rasa identitas komunal yang mempunyai sejarah tradisi yang relatif sama dan berelemen utama kebudayaan, yang mendiami unit geografi yang teridentifikasi/disepakati bersama (David Robertson, 1993). Sedangkan *nation-state* sendiri mengacu kepada konteks dimana ada unit geografi area tertentu sebagai tanah air bagi orang-orang yang mengidentifikasi dirinya sebagai komunitas, karena mempunyai kebudayaan, sejarah, dan mungkin bahasa serta karakter etnik, yang dibangun oleh sistem politik (David Robertson, 1993). Dalam *nation-state* ini, konsep kesepakatan mengacu kepada kesepakatan yang bersifat politis. Sebagai suatu bangsa-negara, Indonesia dibangun atas dasar kesepakatan bersama masyarakat yang berdiam dari Sabang hingga Merauke. Suatu masyarakat yang merasa mempunyai kebudayaan, bahasa, etnik karakter, dan sejarah yang relatif sama,

Harsya Bachtiar (1994), seorang ahli Sosiologi Indonesia, mengatakan bahwa bangsa Indonesia memperoleh para anggotanya melalui dua sumber utama , yaitu (1) suku-suku bangsa pribumi di wilayah Republik Indonesia, dan (2) golongan-golongan penduduk yang berasal dari luar kepulauan Indonesia, murni maupun peranakan, yang kemudian menetap di wilayah Republik Indonesia.

Sehingga menjadi kebetulan kelompok-kelompok etnis yang bersepakat tersebut, berada dalam satu kesatuan administrasi kolonial yang sama, yaitu hindia belanda. Sesuatu yang menjadi daya perekat kesatuan bangsa Indonesia ketika itu adalah keseluruhan faktor-faktor teritorial, etnik dan budaya. Mereka disatukan oleh semangat kebangsaan Indonesia ketika merebut kemerdekaan, hingga kemudian merdeka. Semangat kebangsaan yang bersifat obyektif (kewilayahan, sejarah, dan struktur ekonomi) dan subyektif (kesadaran, kesetiaan, dan kemauan) ada dalam diri etnik-etnik tersebut. Semangat kebangsaan itu lalu berfluktuatif dengan keadaan kondisi Indonesia dari masa ke masa (Pelly, 1998).

## **4.2. Sukubangsa di Indonesia**

Tiap kebudayaan yang hidup dalam suatu masyarakat bisa menampilkan suatu corak khas yang terutama terlihat oleh orang luar yang bukan warga masyarakat bersangkutan. Seroang warga dari suatu kebudayaan hidup dari hari ke hari didalam lngkungan kebudayaannya biasanya tidak lagi melihat corak khas itu. Sebaliknya, terhadap kebudayaan tetangganya, ia dapat melihat corak khasnya, terutama mengenai unsur-unsur yang berbeda menyolok dengan kebudayaannya sendiri. Corak khas dari suatu kebudayaan bisa tampil karena kebudayaan itu menghasilkan suatu unsur yang kecil berupa satu unsur kebudayaan fisik dengan bentuk yang khusus; atau karena diantara pranata-pranatanya ada suatu pola sosial yang khusus; atau dapat juga karena warganya menganut suatu thema budaya yang khusus. Sebaliknya, corak khas tadi juga dapat disebabkan karena adanya kompleks unsur-unsur yang lebih besar. Berdasarkan atas corak khusus tadi, suatu kebudayaan dapat dibedakan dari kebudayaan yang lain.

Konsep yang tercakup dalam istilah sukubangsa adalah suatu golongan manusia yang terikat oleh kesadaran dan identitas akan kesatuan kebudayaan, dimana kesadaran dan identitas ini

biasanya dikuatkan oleh kesatuan bahasa; kesatuan kebudayaan ini bukan suatu hal yang ditentukan oleh analisa fihak diluar kebudayaan itu sendiri melainkan oleh warga kebudayaan yang bersangkutan. Dengan demikian kebudayaan Bali merupakan suatu kesatuan, yang berbeda dengan kebudayaan Tengger, atau kebudayaan Jawa, atau kebudayaan Lombok, dimana orang-orang Bali sendiri sadar bahwa diantara mereka ada keseragaman pada kebudayaannya, yaitu kebudayaan Bali yang mempunyai kepribadian dan identitas khusus, berbeda dengan kebudayaan-kebudayaan tetangganya itu. Apalagi adanya bahasa Bali yang berbeda dengan bahasa-bahasa lain yang lebih memperkuat kesadaran akan kepribadian khusus tadi. Dalam istilah umum, konsep tentang sukubangsa ini disebut sebagai „ *ethnic group* “ atau „kelompok etnik“.

## **5. Perspektif Kebhinekaan Masyarakat Dan Kebudayaan Di Indonesia**

Harsja Bactiar (1994) menggambarkan bahwa dalam istilah resmi dan untuk sejumlah kepentingan *administratif* praktis, pemerintah Indonesia membagi sukubangsa di Indonesia menjadi tiga golongan, ialah: (1) sukubangsa; (2) golongan keturunan asing; dan (3) masyarakat terasing. Semua sukubangsa memiliki daerah asal dalam wilayah Indonesia, sedangkan golongan keturunan asing tersebut dalam butir (2) tidak memilikinya karena daerah asal mereka terdapat diluar wilayah Indonesia (Cina, Arab, India, Eropa), atau karena keturunan percampuran (Indo-Eropa), dalam perkembangannya kemudian mereka dihadapkan pada dua alternatif, akan menjadi warga negara Indonesia dengan segala konsekuensinya, atau kembali ke negara asalnya dan tetap dianggap sebagai warga asing; kecuali orang keturunan Eropa, maka sukubangsa seperti keturunan Cina, Arab, dan India kemudian banyak yang menjadi warga negara Indonesia. Masyarakat terasing dianggap penduduk yang masih hidup dalam taraf kebudayaan sederhana, dan biasanya masih tinggal dalam lingkungan yang terisolasi.

Undang-undang Dasar 1945 mengakui perbedaan sukubangsa yang besar di antara penduduk Indonesia dan menjamin persamaan status bagi semua sukubangsa yang ada di negara ini, tanpa melihat besarnya penduduk masing-masing sukubangsa. Semua sukubangsa mempunyai hak yang sama untuk mengembangkan kebudayaan dan bahasa mereka masing-masing, membentuk pusat-pusat kebudayaan mereka sendiri, museum, dan lain-lain namun bahasa yang digunakan dalam pendidikan resmi adalah bahasa Indonesia, meskipun selama tiga tahun pertama bahasa daerah masih digunakan di sekolah.

### **5.1. Kebudayaan dalam perspektif Suku bangsa**

Kebhinekaan etnolinguistik yang luas dari penduduk Indonesia dimulai sejak masa silam; Hildred Geertz (1981), seorang ahli Antropologi tentang Indonesia, menyatakan bahwa dari sekitar 300 sukubangsa yang ada di Indonesia, sekurangnya ada 250 bahasa daerah yang dipergunakan; Geertz membagi penggunaan bahasa daerah itu menjadi tiga klasifikasi, yaitu (1) kelompok keluarga bahasa *Melayu Polinesia*, yaitu bahasa-bahasa yang digunakan diseluruh kepulauan Indonesia Barat dan Tengah, (2) kelompok keluarga bahasa *Halmahera Utara*, dan (3) kelompok keluarga bahasa-bahasa *Papua*, termasuk didalamnya kelompok Ambon-Timor, Sula–Bacan, dan kelompok Halmahera selatan serta Papua. Pengaruh-pengaruh sejarah kebudayaan yang beraneka-warna yang selama berabad-abad dialami oleh penduduk nusantara ini di berbagai daerah, telah menambah keanekaragaman itu. Daerah-daerah tertentu telah dipengaruhi oleh unsur-unsur kebudayaan dari India, Persia, Arab,

Cina, dan Eropa Barat, yang menyebabkan perubahan dasar dalam kebudayaan masyarakat yang telah beranekaragam itu, yang terdapat di berbagai daerah di kepulauan nusantara.

## **5.2. Kebudayaan dalam perspektif keturunan asing**

Tidak seperti sukubangsa, penduduk yang termasuk sebagai golongan keturunan asing pada umumnya diharapkan dapat berasimilasi dengan sukubangsa di daerah tempat mereka berada atau sepenuhnya menganut kebudayaan nasional Indonesia. Kebudayaan nenek moyang mereka hanya untuk dianut dalam kehidupan pribadimereka. Orang Arab Indonesia dengan nyata telah mencapai asimilasi ini, dan mereka hanya dibedakan dari penduduk asli melalui ciri-ciri ras mereka, sedangkan orang India Indonesia dan orang Indo-Eropa sangat kecil dan tak penting jumlahnya, dan mereka terintegrasi atau menganut kebudayaan leluhurnya dalam pergaulan pribadi saja. Sebaliknya, orang keturunan Cina, pada umumnya hidup di daerah perkotaan dan mendominasi sektor ekonomi perkotaan masyarakat kota, sehingga mendudukan mereka pada kategori sosial yang sangat penting dalam masyarakat.

Dalam pada itu, mengikuti pengertian sukubangsa sebagaimana tersebut di atas, baik orang-orang Tionghoa yang datang terdahulu, ataupun mereka yang datang kemudian secara suka rela melalui media perdagangan, maupun yang didatangkan oleh kolonial Belanda yang maksudnya diperbantukan dalam sektor perdagangan, agaknya tidak bisa lagi dilihat sebagai kelompok luar masyarakat; keberadaan mereka di bumi Indonesia ini telah turun menurun untuk beberapa generasi, menganggap diri sebagai penduduk di negeri ini, memutuskan untuk kemudian menetap secara utuh dengan berusaha melebur dalam budaya Indonesia; walau masih ada ikatan-ikatan emosional dengan negeri leluhurnya, tercermin dalam beberapa unsur kebudayaan yang masih kuat melekat dalam kehidupannya, namun karena secara fisik tidak ada lagi hubungan-hubungan dengan tanah asal mereka atau orang-orang yang tinggal di sana, maka lambat laun orang-orang Tionghoa ini lebih mengakui sebagai bagian dari masyarakat Indonesia daripada masyarakat Tionghoa. Walaupun secara kuantitas (jumlah jiwa) sedikit, akan tetapi umumnya kedudukan mereka sangat kuat di sektor ekonomi dan sangat berpengaruh pada hubungannya dengan sukubangsa-sukubangsa lain di Indonesia , yang sebagai keseluruhan biasanya ditempatkan sebagai golongan pribumi.

## **5.3. Kebudayaan dalam perspektif masyarakat terasing**

Masyarakat terasing merupakan golongan sukubangsa yang terisolasi yang masih hidup dari berburu, meramu atau berladang padi, keladi dan umbi-umbian dengan cara ladang berpindah, mereka membuka hutan melalui penggunaan teknik peladangan bakar. Biasanya mereka terhambat dari perubahan dan kemajuan karena isolasi geografi mereka, namun kadang-kadang juga karena upaya-upaya mereka sendiri yang disengaja, untuk menolak bentuk perubahan kebudayaan apapun, seperti halnya orang Baduy di Banten. Banyak warga masyarakat terasing kini mulai mengintegrasikan diri mereka dalam kebudayaan nasional Indonesia, dan kebudayaan tradisional mereka menghilang dengan cepat. Koentjaraningrat (1993) mengemukakan beberapa golongan masyarakat terasing yang masih tinggal adalah: (1) orang laut yang bersifat pengembara, sebagaimana yang tercatat dalam karangan-karangan etnografi; (2) Orang Darat, yang hidup tersebar di daerah dataran rendah berawa di Sumatra Timur hingga ke kaki Bukit Barisan di pedalaman; (3)

Penduduk kepulauan Mentawai, pulau-pulau di sebelah Sumatra Barat; (4) Orang Baduy di Banten Selatan, Jawa Barat; (5) Orang Donggo, di bagian pedalaman pegunungan Sumbawa Timur; (6) kelompok pengembara orang Punan (atau Penan) yang berpindah-pindah di sepanjang hulu sungai-sungai besar di Kalimantan; (7) Orang Tajio, di Sulawesi Tengah; (8) Orang Amma Toa di Sulawesi Tenggara; (9) Orang Togutil di Halmahera Utara, dan (10) penduduk lembah-lembah pegunungan Tengah di Irian Jaya serta mereka yang hidup di hulu-hulu beberapa buah sungai besar

#### **5.4. Kebudayaan dalam perspektif hukum adat**

Seorang sarjana Belanda C. Van Vollenhoven (1948) membedakan kebudayaan sukubangsa Indonesia berdasarkan sistem lingkaran-lingkaran hukum adat dari masing-masing sukubangsa yang tersebar di Indonesia; Van Vollenhoven membagi lingkaran-lingkaran itu ke dalam 19 daerah hukum adat, yaitu yang meliputi: Aceh, Gayo-Alas dan Batak (termasuk Nias dan Batu), Minangkabau (termasuk Mentawai), Sumatera Selatan (termasuk Enggano), Melayu, Bangka dan Biliton, Kalimantan (termasuk Sangir-Talaud) Gorontalo, Toraja, Sulawesi Selatan, Ternate, Ambon Maluku (termasuk kepulauan Barat Daya), Irian, Timor, Bali dan Lombok, Jawa Tengah dan Jawa Timur, Surakarta dan Yogyakarta, dan Jawa Barat.

#### **5.5. Kebudayaan menurut kompleksitas : desa – kota**

Persebaran masyarakat di Indonesia sangat beragam, namun sekurangnya ada dua bentuk masyarakat menurut perkembangan budaya yang ada; bentuk pertama adalah tipe masyarakat dengan intensitas interaksi yang terbuka sehingga memudahkan mereka untuk mengembangkannya, yang termasuk dalam tipe ini adalah masyarakat perkotaan, juga disebut juga sebagai masyarakat kompleks dan modern, serta cenderung heterogen; bentuk kedua adalah tipe masyarakat yang relatif terisolasi sehingga intensitas interaksi dengan masyarakat lain cenderung kurang bahkan sangat terbatas, yang termasuk dalam tipe ini adalah masyarakat pemburu dan peramu (*tribe*) dan masyarakat pedesaan, yang juga disebut sebagai masyarakat sederhana dan tradisional, dan kehidupannya cenderung homogen (Boelaars, 1984).

kedua bentuk masyarakat ini sebenarnya adalah satu rumpun budaya, namun karena ada karakteristik tertentu yang berbeda dari kedua persekutuan hidup ini sehingga masing-masing dibedakan menurut kebudayaannya. Perbedaan itu adalah sebagai suatu keadaan tentang bagaimana masing-masing mereka mensikapi alam sekitarnya, dan dari perbedaan ini kemudian memberikan pengaruh terhadap seperangkat aspek kehidupan yang lain. Masyarakat modern tidak menggunakan alam sebagai dasar penghidupannya, sehingga mereka tidak tergantung pada alam, sedangkan masyarakat tradisional menggunakan alam sebagai dasar penghidupannya sehingga mereka sangat tergantung pada alam sekitar tempat hidupnya.

### **6. Kebudayaan Indonesia: Kebudayaan Nasional**

Sejak tahun 1945, Indonesia beserta seluruh penduduknya telah menyatakan diri dan diakui oleh hampir seluruh Negara yang ada di dunia sebagai suatu Negara yang merdeka dan berkedaulatan; tahun 1945 sebenarnya adalah proses kesinambungan dari tahun-tahun sebelumnya yang dimulai dari berbagai pemikiran dan pergerakan sebelum tahun 1928 yang

secara resmi seluruh penduduk pribumi Indonesia menyatakan diri sebagai satu bangsa : bangsa Indonesia; satu tanah air : tanah air Indonesia; satu bahasa : bahasa Indonesia, yang semuanya dituangkan dalam kesepakatan para pemuda Indonesia pada saat itu : *Sumpah Pemuda*. Pernyataan diri ini secara tersirat mengandung pengertian bahwa pada saat itu mulai timbul benih-benih kesepakatan hidup bersama dari segenap masyarakat pribumi untuk mengacu pada satu nilai-nilai yang sama yang dalam konteks ini disebut sebagai kebudayaan – kebudayaan bersama, kebudayaan nasional.

Pada saat-saat menjelang kemerdekaan, keinginan untuk merdeka dari penguasaan orang asing (Belanda) dan hak untuk menentukan nasibnya sendiri sedemikian kuat, sampai-sampai segenap orang seolah melupakan perbedaan yang tajam diantara mereka apakah itu latar belakang budaya (kelompok etnik), agama, ras, golongan dan perbedaan lain yang dalam keadaan normal sebenarnya sangat potensial sebagai sumber pertentangan. Setelah kemerdekaan, semangat untuk menjunjung nilai-nilai persatuan dan kesatuan dijadikan modal dasar dalam menggalang kehidupan bersama dan bernegara, hanya saja sekarang tujuannya tidak lagi membebaskan diri dari cengkraman penjajahan asing melainkan meneruskan cita-cita perjuangan untuk menjadi Negara dan bangsa Indonesia yang kuat dan besar sesuai dengan nilai-nilai hakiki seperti yang tertuang dalam Pancasila dan UUD 1945.

Konsep tentang kebudayaan Indonesia yang kemudian diperjelas menjadi kebudayaan nasional (Indonesia) atau kebudayaan bangsa bukan merupakan pembahasan baru dalam konteks kehidupan masyarakat Indonesia. Pada tahun 1930 para intelektual dan pemerhati sosial di Indonesia telah mulai berembuk dan berusaha menemukan konsep yang paling tetap untuk kebudayaan nasional ini; kejelasan konsep kebudayaan nasional ini dianggap penting karena selain didalamnya termuat berbagai pedoman nilai juga mencerminkan simbol identitas bangsa, sebagaimana tertuang dalam UUD 1945 sebagai berikut :

Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 Pasal 32 menyatakan bahwa Pemerintah memajukan kebudayaan nasional Indonesia. Selanjutnya, penjelasan pasal tersebut menyatakan bahwa kebudayaan bangsa ialah kebudayaan yang timbul sebagai buah usaha budinya rakyat Indonesia seluruhnya. Kebudayaan lama dan asli yang terdapat sebagai puncak-puncak kebudayaan di daerah-daerah di seluruh Indonesia terhitung sebagai kebudayaan bangsa. Usaha kebudayaan harus menuju ke arah kemajuan adab, budaya, dan persatuan dengan tidak menolak bahan-bahan baru dari kebudayaan asing yang dapat memperkembangkan atau memperkaya kebudayaan bangsa sendiri, serta mempertinggi derajat kemanusiaan bangsa Indonesia dan dalam Garis-garis Besar Haluan Negara dinyatakan sebagai Perwujudan pembangunan berwawasan nusantara, Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) 1993 mengamanatkan bahwa bangsa Indonesia yang terdiri dari berbagai suku dengan latar belakang berbagai bahasa dan kebudayaan daerah serta memeluk dan meyakini berbagai agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa merupakan satu kesatuan bangsa yang bulat dalam arti seluas-luasnya. Selanjutnya, diamanatkan pula bahwa budaya bangsa pada hakikatnya satu, sedangkan corak ragam budaya menggambarkan kekayaan budaya bangsa yang merupakan modal dan landasan pengembangan budaya bangsa seluruhnya dengan tidak menolak nilai-nilai budaya lain yang tidak bertentangan dengan nilai budaya bangsa yang hasil-hasilnya dapat dinikmati oleh bangsa. Budaya bangsa Indonesia yang dinamis yang telah berkembang sepanjang sejarah bangsa serta bercirikan kebhinnekaan dan keekaan bangsa merupakan modal dasar bagi pembangunan nasional.

Untuk merumuskan konsep tentang kebudayaan nasional dari masyarakat Indonesia yang sangat beragam ini bukanlah hal yang mudah. Berbagai perumusan dan pendapat tentang konsep kebudayaan nasional kemudian muncul dan menimbulkan polemik; untuk lebih mempermudah penggambaran kebudayaan nasional ini maka kerangka berpikir kebudayaan dapat dianalisa menurut alur substansi, orientasi, dan fungsi mungkin bisa dijadikan sebagai dasar acuan.

### *Substansi*

Dalam hal ini kebudayaan nasional dilihat dari segi isi kebudayaan itu sendiri, yang menurut beberapa pemerhati kebudayaan dinyatakan sebagai berikut :

- Poerbatjaraka, menganjurkan agar orang Indonesia banyak mempelajari sejarah kebudayaannya, agar dapat membangun kebudayaan yang baru. Kebudayaan Indonesia baru itu harus berakar kepada kebudayaan Indonesia sendiri atau kebudayaan pra-Indonesia
- Ki Hajar Dewantara, menyatakan bahwa kebudayaan nasional Indonesia adalah puncak-puncak kebudayaan daerah.

### *Orientasi*

Dalam perspektif orientasi budaya, dimaksudkan bahwa budaya nasional itu mencirikan satu arah tujuan bangsa Indonesia yang jelas, para pemerhati kebudayaan dengan buah pikir dari perspektif orientasi ini antara lain :

- Alisyahbana, menyatakan bahwa Kebudayaan Nasional Indonesia merupakan suatu kebudayaan yang dikreasikan, yang baru sama sekali, dengan mengambil banyak unsur dari kebudayaan yang kini dianggap paling universal, yaitu budaya Barat. Unsur yang diambil terutama adalah teknologi, orientasi ekonomi, organisasi, dan sains. Begitu juga orang Indonesia harus mempertajam rasio akalnya dan mengambil dinamika budaya Barat. Pandangan ini mendapat sanggahan sengit dari beberapa pemikir lainnya.
- Sanusi Pane, salah seorang yang menentang keras buah fikir dari Alisyahbana, Pane menyatakan bahwa kebudayaan Nasional Indonesia sebagai kebudayaan Timur harus mementingkan aspek kerohanian, perasaan dan gotong-royong, yang bertentangan dengan kebudayaan Barat yang terlalu berorientasi kepada materi, intelektualisme dan individualisme.
- Adinegoro, mengajukan sebuah gagasan yang lebih moderat, yaitu agar pendidikan nasional Indonesia didasarkan pada kebudayaan nasional Indonesia, sedangkan kebudayaannya harus memiliki inti dan pokok yang bersifat kultur nasional Indonesia, tetapi dengan kulit (peradaban) yang bersifat kebudayaan Barat.

### *Fungsi*

Dalam perspektif fungsi dimaksudkan sebagai usaha untuk menggambarkan suatu kerangka budaya nasional dari pendekatan fungsi kebudayaan itu sendiri bagi bangsa Indonesia; tokoh yang berusaha mengemas konsep kebudayaan menurut pendekatan fungsi dan buah pikirannya adalah:

Koentjaraningrat, menyebutkan bahwa kebudayaan nasional Indonesia sekurangnya harus memiliki dua fungsi: (1) sebagai suatu sistem gagasan dan pralambang yang memberi identitas kepada warga negara Indonesia dan (2) sebagai suatu sistem gagasan dan

pralambang yang dapat dipergunakan oleh semua warga negara Indonesia yang bhinneka itu, untuk saling berkomunikasi, sehingga memperkuat solidaritas. Dalam fungsinya yang pertama, kebudayaan nasional Indonesia memiliki tiga syarat: (a) harus merupakan hasil karya warga negara Indonesia, atau hasil karya orang-orang zaman dahulu yang berasal dari daerah-daerah yang sekarang merupakan wilayah negara Indonesia; (b) unsur itu harus merupakan hasil karya warga negara Indonesia yang tema pikirannya atau wujudnya mengandung ciri-ciri khas Indonesia; dan (c) harus sebagai hasil karya warga negara Indonesia lainnya yang dapat menjadi kebanggaan mereka semua, sehingga mereka mau mengidentitikan diri dengan kebudayaan itu. Dalam fungsi kedua, harus ada tiga syarat yaitu dua di antaranya sama dengan syarat nomor satu dan dua fungsi pertama, syarat nomor tiga yaitu harus sebagai hasil karya dan tingkah laku warga negara Indonesia yang dapat difahami oleh sebahagian besar orang Indonesia yang berasal dari kebudayaan suku-suku bangsa, umat agama, dan ciri keturunan ras yang aneka warna, sehingga menjadi gagasan kolektif dan unsur-unsurnya dapat berfungsi sebagai wahana komunikasi dan sarana untuk menumbuhkan saling pengertian di antara aneka warna orang Indonesia, dan mempertinggi solidariti bangsa.

Kebudayaan nasional Indonesia adalah semua yang dikategorikan sistem nasional apakah itu berbentuk gagasan kolektif, berbentuk material seperti sistem pendidikan, sistem politik, sistem hukum, dan sistem lainnya dan berbentuk perilaku seperti menghargai kemajemukan, atau pluralitas, menunjang hak dan kewajiban adalah kebudayaan nasional Indonesia. Brahmana (1997) berusaha menuangkan gagasan tentang konsep kebudayaan Indonesia menurut dua pendekatan wujud kebudayaan, yaitu sebagai wujud idea dan sebagai wujud material.

Berdasarkan wujud ide definisi kebudayaan adalah semua pola atau cara berfikir/merasa bangsa dalam suatu ruangan dan waktu. Pengertian ini dikembangkan ke dalam kebudayaan Indonesia menjadi Kebudayaan Nasional Indonesia semua pola atau cara berfikir/merasa bangsa Indonesia yang sama terhadap kelangsungan hidupnya di dalam sebuah negara. Berdasarkan definisi di atas, definisi Kebudayaan Nasional Indonesia berdasarkan sisi ide dapat dijelaskan semua pola atau cara berfikir/merasa bangsa Indonesia dalam suatu ruangan dan waktu. Pola atau cara berfikir/merasa ini dapat dimulai sesudah adanya Sumpah Pemuda (1928) atau sesudah Indonesia Merdeka (1945) hingga saat ini. Pilihan angka tahun ini (1928) karena, pada masa ini sudah tumbuh keinginan untuk bersatu (cara berfikir/merasa yang seragam untuk mencapai cita-cita atau tujuan bersama) ke dalam sebuah negara. Keinginan ini kemudian wujudkan pada tahun 1945 (kemerdekaan Indonesia).

Sedangkan kebudayaan nasional Indonesia berdasarkan wujud material adalah produk dari suatu bangsa dalam suatu ruangan dan waktu. Misalnya semua produk bangsa Indonesia baik yang dikembangkan di luar negeri, maupun yang dikembangkan di dalam negeri, yang tumbuh dan berkembang sejak Indonesia Indonesia merdeka (1945) atau sesudah Sumpah Pemuda (1928) hingga saat ini, apakah itu yang diserap dari kebudayaan etnik maupun kebudayaan asing, baik melalui proses difusi, akulturasi yang disepakati menjadi bagian dari alat mencapai tujuan nasional bersama di dalam negara kesatuan RI. Darimana asal kebudayaan ini tidak dipersoalkan, selagi bentuk kebudayaan yang diserap itu mampu mempersatukan dan memepererat persatuan dan kesatuan, itulah Kebudayaan Nasional Indonesia.



## KESIMPULAN

Gelombang perpindahan penduduk dari dataran Cina sebagai awal keberadaan masyarakat Indonesia sangat mewarnai perkembangan masyarakat Indonesia pada masa-masa selanjutnya, keadaan ini berlangsung pada jaman prasejarah.

Rentangan yang luas dari bumi Indonesia yang terdiri dari beribu-ribu pulau menyebabkan masyarakatnya hidup secara terpisah, namun bukan berarti tidak ada hubungan sama sekali di antara mereka. Dengan letak geografisnya yang strategis juga ditunjang oleh kekayaan alam yang melimpah banyak menarik minat bangsa-bangsa lain untuk berusaha menguasainya. Tidak heran bahwa dalam sejarah perjalanan bangsa Indonesia, banyak diwarnai dengan kunjungan-kunjungan perniagaan sampai pada pendudukan wilayah Indonesia oleh bangsa asing.

Terlepas dari pengaruh baik-buruknya hubungan antara bangsa asing dengan berbagai masyarakat yang ada di Indonesia, bila dilihat dari sisi budaya ternyata bangsa asing itu sangatlah berkontribusi terhadap keadaan politik dan perkembangan budaya-budaya lokal.

Praktek kolonialisme yang ada di Indonesia ternyata telah membangkitkan rasa penderitaan dan nasib yang sama dari berbagai perbedaan, lapisan, dan bentuk masyarakat yang tersebar di Indonesia. Keinginan yang kuat untuk melepaskan diri dari belenggu penjajahan ternyata mampu melucuti seperangkat perbedaan masyarakat, dimana semua pihak mengikrarkan diri sebagai satu kesatuan dibawah nilai-nilai kebangsaan, kewilayahan, dan kebahasaan. Nilai-nilai inilah yang dianggap sebagai cikal-bakal keberadaan kebudayaan bersama : kebudayaan Indonesia.

Namun dalam perkembangannya, tentu tidak lepas dari unsur kepentingan dan juga pengakuan, kebudayaan Indonesia sebagai suatu induk kebudayaan dan konsep kesatuan kemudian menuai berbagai masalah. Agaknya sukar bagi kebudayaan Indonesia untuk bisa mengakomodir segenap aspirasi dari seluruh budaya-budaya lokal yang ada. Perumusan kebudayaan nasional kemudian dinyatakan dalam konsep-konsep yang lebih sederhana yaitu dengan merumuskannya dalam bentuk substansi, orientasi, dan fungsi kebudayaan itu sendiri selain dari perumusan tentang kebudayaan Indonesia sebagai kompleks dari idea dan material tentang keteradaan, keberlangsungan, dan pencarian budaya.

Keteradaan budaya berarti bahwa kebudayaan Indonesia itu sudah terbentuk, dari mulai kesadaran politik untuk membentuk Negara, menetapkan sumber-sumber hukum dan nilai, Pancasila dan UUD 45 sebagai pandangan hidup dan dasar negara, bahasa Indonesia, teknologi yang diambil dari luar, pendidikan, modernisasi dalam segala lapangan, sistem politik, kesenian seperti musik dengan variasinya yang digandrungi dengan melewati batas agama, suku, daerah, pendidikan dan status sosial, tanpa mempersoalkan asal-usul asal budaya tersebut.

Keberlangsungan budaya berarti bahwa kebudayaan Indonesia itu dalam proses pembentukan yang senantiasa menentukan nilai-nilai yang terbaik sebagai pengaruh dorongan-dorongan perubahan baik dari dalam ataupun dari luar masyarakat. Dalam proses pencarian berarti bahwa kebudayaan Indonesia itu senantiasa berusaha mewujudkan suatu kondisi yang diharapkan dari satu bentuk kehidupan bersama; yaitu dengan memupuk kesadaran bahwa bangsa Indonesia adalah satu potensi kekuatan dari bangsa yang besar, yang

untuk itu sangat diperlukan kerjasama, semangat kebersamaan, rasa toleransi, empati yang tinggi yang senantiasa mengacu pada substansi tiga orientasi waktu : *masa lalu, masa kini, dan masa depan.*

### **Sumber- Sumber rujukan :**

Alisyahbana, Sutan Takdir. (1988). *Kebudayaan Sebagai Perjuangan*. Jakarta: PT Dian Rakyat.

Bachtiar, Harsya. (1994). *Masyarakat Indonesia*, dalam Majalah Ilmu-ilmu Sosial Di Indonesia jilid xx, No.4; Jakarta: Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia.

Boelaars, Y. (1984). *Kepribadian Indonesia Modern, Suatu Peelitian Antropologi Budaya*. Jakarta: PT Gramedia

Brahmana, Pertampilan S. 1997. *Awal Pertumbuhan Kebudayaan Nasional Indonesia*. Karya Tulis Pada Program Magister Kajian Budaya UNUD.

Geertz, Clifford (1982). *Abangan, Santri dan Priyayi Dalam Masyarakat Jawa*. Jakarta : Pustaka Jaya, Yayasan Ilmi-Ilmu Sosial.

Geertz, Hildred. (1981). *Aneka Budaya dan Komunitas di Indonesia*. Penerjemah : A Rahman Zainuddin. Jakarta : Yayasan Ilmu-Ilmu Sosial dan FIS - UI

Harsojo. (1999). *Pengantar Antropologi*. Bandung : CV Putra A Bardin.

Ignas Kleden, (1987). *Sikap Ilmiah dan Kritik Kebudayaan*. Jakarta : LP3ES

Koentjaraningrat. (1993), *Masalah Kesukubangsaan dan Integrasi Nasional*. Jakarta : Penerbit Universitas Indonesia (UI- Press).

Koentjaraningrat. (1996). *Pengantar Ilmu Antropologi*; Jakarta: Rineka Cipta.

Melalatoa, Junus M. ed. (1997). *Sistem Budaya Indonesia*, Jakarta: Kerjasama FISIP Universitas Indonesia dengan PT. Pamator

Parsudi Suparlan, (1999). “*Konflik Sosial dan Alternatif Pemecahannya*”. Jurnal Antropologi Indonesia No. 59 Th XXIII, Mei-Agustus .

Usman Pelly. (1998). “*Masalah Batas-Batas Bangsa*”. Jurnal Antropologi Indonesia No. 54 Th XXI, Desember 1997- April 1998.

# Krisis Budaya Nasional Indonesia Di Tengah Arus Globalisasi

---

*Gencarnya arus globalisasi dengan diikuti hadirnya kecanggihan teknologi di dalam penerapannya yang menerpa Indonesia, membuat lahirnya peradaban Indonesia dibawa menuju kearah kehidupan dunia barat. Lahirnya modernisasi di dalam masyarakat kita telah sedikit banyak merubah cara pandang dan pola hidup masyarakat, sehingga peradaban yang tercipta merupakan duplikasi budaya masyarakat barat yang cenderung berjiwa konsumtif dan hedonis. Berbagai macam fenomena kehidupan yang terjadi di lingkungan masyarakat dewasa ini, telah mengilustrasikan suatu keadaan yang mencerminkan layaknya kehidupan masyarakat dunia barat dan telah menggeser kedudukannya dari budaya kelokalan Indonesia telah eksis sebelumnya. Pola ini memang sengaja dilakukan oleh para penguasa media yang melahirkan dan mempopulerkan pola hidup semacam itu lewat pengaruh produknya yang notabene sebagai cerminan kebudayaan lebih modern serta digembar-gemborkan melalui jejaring medianya yang telah mereka bangun sebelumnya, hingga masyarakat khususnya generasi muda terkena dampak dan bertekuk lutut meniru secara mentah-mentah tanpa adanya koreksi diri dari produk di balik tayangan medianya dari lansiran kaum kapitalis itu. Industri media yang menguasai jaringan cyber digital space itu, memang telah sengaja mengobrak-abrik tatanan hidup bangsa Indonesia yang terkenal satun itu, dan telah menjadi bagian dari jatidiri bangsa Indonesia selama bangs ini didirikan oleh para pendahulunya, kini diganti dengan kebudayaan seronok, berperilaku rusak, dangkal pemikiran, berjiwa pragmatis, instan, konsumtif serta hedonis. Jaringan media entah dalam bentuk televise atau film yang harusnya sebagai alat pencerahan hidup masyarakat, kini telah mengambil alih posisinya, sehingga budaya luhur dan norma kesantunan yang sudah mapan warisan dari nenek moyang itu, kini keberadaanya digantikan dengan budaya baru sebagai cerminan realitas palsu yang berkembang ditengah kehidupan masyarakat melalui berbagai sarana jaringan media yang ada, hingga pada akhirnya lahir peradaban barudengan keragaman bentuk hasil replika dari kebudaaan barat di tanah Indonesia.*

## **Pendahuluan**

Ketika frame berpikir kita diarahkan untuk memasuki era Millenium ke tiga, maka mata kita akan tercengang melihat segala sesuatu yang terekam dalam pikiran tat kala kita melihat pergerakan benda-benda luar angkasa dan pada saat bersamaan salah satu meteor bergerak kearah kita, dan tanpa sadar tiba-tiba kita berteriak lalu terjungkal jatuh kelantai menimpah kakak kita yang sedang menikmati nasi tumpeng hasil dari kenduri hajatan tetangga sebelah. Ilustrasi di atas merupakan hasil pengaruh perekayasaan gambar televisi berteknologi 3D. Abad millinium ketiga adalah abad berperannya teknologi canggih dalam kehidupan manusia, dimana perangkat-perangkat teknologi yang menyertai segala macam aktifitas manusia telah berganti dari sistem manual menjadi sistem digital. Kehadiran teknologi digital ditengah aktifitas manusia telah menunjukkan tingkat peradaban manusia pada titik kulminasi eksperimentasi teknologi, di mana kenyataan ini menegaskan bahwa perangkat “teknologi digital” telah menggeser pemahaman “logika matematis” konvensional. Dengan demikian akan terjadi pengkaburan persepsi antara “akal manusia” yang menghasilkan persepsi dengan “akal buatan” yang menghasilkan teknologi, dan akibatnya dampak realitas yang terlahir adalah jarak “rohani” menangkap suatu peristiwa yang tadinya dibatasi dari layar monitor ke mata, kini lebih dekat

lagi sampai ke lensa mata, dan semakin mendekat lagi hingga “diri kita” telah masuk dan dipermainkan oleh mesin-mesin canggih melalui perangkat Cyber Virtual Digital.

Modernisasi yang dikumandangkan di berbagai belahan dunia, tanpa disadari akan melahirkan budaya baru dengan mengusung atas perkembangan dan berperannya teknologi dalam proses kelangsungan kehidupan manusia itu sendiri, sehingga peradaban yang terlahir menjadi gegap gempita dan luar biasa.

Berbagai macam karya-karya imajinatif yang dihasilkan dari sentuhan system teknologi digital telah merubah peradaban dunia menjadi lebih megah dan dinamis. Segala macam benda-benda yang menjadi pendamping dan alat beraktifitas manusia mulai dari tempat tinggal, transportasi serta hiburan sampai gaya hidup, kini telah menunjukkan pergeseran dari mekanik ke elektrik. Revolusi teknologi makin menguasai dunia ketika teknologi informasi menunjukkan keberadaannya. Kenyataan ini menegaskan bahwa, berperannya kehadiran teknologi informasi dalam relung-relung kehidupan manusia, membuat sesuatu yang tadinya ada sebatas angan-angan di “dunia maya”, kini telah menjadi suatu hal yang seolah-olah menjadi “realitas sebenarnya”, bahkan komunikasi antar manusia semakin lebih dekat. Pada awalnya persepsi manusia menyatakan, bahwa dunia ini sangat luas dan untuk berkomunikasi tentunya diperlukan waktu yang panjang dan berliku-liku dalam proses operasionalnya. Namun persepsi itu kini argumentasinya dapat dipatahkan, karena pada kenyataannya kini luasnya dunia bahkan sampai jagat rayapun seolah-olah berada dalam satu genggam tangan. Pandangan ini didasarkan pada kenyataan bahwa peralatan teknologi informasi dengan berbagai kecanggihannya yang terlahir, akan membawa arusinformasi dunia dan komunikasi antar negara telah terkoneksi melalui jaringan teknologi informasi cyber digital yang terhubung antara negara satu dengan negara lainnya secara on line, hingga arus informasi yang ada di dalamnya telah menyebar ke seluruh dunia dan kini keberadaannya sulit dibendung lagi penyebarannya, inilah yang sering terdengar oleh kita dengan istilah “globalisasi”.

Globalisasi muncul sebagai pergerakkan pemikiran manusia untuk ingin mengetahui isi dunia. Secara teoretis globalisasi juga dapat dikatakan sebagai penggambaran dari teori evolusi yang telah dikemukakan oleh Darwin dengan pergerakan perkembang biakan pertumbuhan dari hewan primata itu menjadi asal mulanya manusia. Demikian juga dengan istilah globalisasi merupakan penggambaran dari puncak perubahan peradaban manusia yang telah menunjukkan pergerakannya. Kenyataan ini dapat diilustrasikan bahwa manusia mengalami pergerakan dalam melangsungkan kehidupannya, dimulai dari kehidupan zaman primitif dimana kehidupan bergantung pada kondisi alam. Kemudian bergerak ke zaman roda, setelah mesin ditemukan masuklah kehidupan zaman mekanik, dimana aktifitas manusia diimbangi dengan peralatan berteknologi manual. Revolusi industri dan ditemukannya teknologi elektrik dengan menggunakan kekuatan listrik sebagai sumbernya, membuat manusia terus bereksperimentasi dengan teknologi untuk menciptakan sesuatu yang baru, sampai pada akhirnya dihadapkan dengan situasi zaman modern. Modernisasi yang dilakukan secara besar-besaran dalam dunia teknologi hingga melahirkan teknologi digital yang memungkinkan manusia masuk dalam “dunia maya” seperti sekarang ini kita rasakan. Kenyataan ini menyatakan bahwa lahirnya teknologi terkini membuat manusia semakin mudah untuk mewujudkan ide imajinatifnya segala apapun, dengan mudah dapat terwujud. Sehingga persepsi tentang suatu realitas yang ada dan tiada sangat tipis bedanya. Hal ini disebabkan oleh “perkembangan teknologi informasi memungkinkan manusia hidup dalam ruang di mana mitos “ada” menjadi dunia citraan media massa” (Heidegger, 1999).

Teknologi informasi yang lahir dan dibesarkan di dunia barat, telah lebih banyak diterapkan oleh kelompok kapitalis yang menguasai pasar industri. Dunia industri dengan segala macam pengetahuan yang terlahir telah memaksa teknologi informasi berada dipihaknya hingga peradaban yang terlahir adalah tangan-tangan pemedali pasar industri. “Globalisasi telah menjadi kekuatan yang membutuhkan respons tepat karena ia memaksa suatu strategi bertahan hidup (*survival strategy*) dan strategi pengumpulan kekayaan (*accumulative strategy*) bagi berbagai kelompok dan masyarakat” (Featherstone,1991). Kenyataan ini memberi dampak bahwa proses yang terjadi telah membawa pasar dunia industri dengan segala macam bentuk dan format operasionalisasinya menjadi suatu kekuatan dominan dalam pembentukan nilai dan tatanan sosial yang bertumpuh pada prinsip-prinsip perekonomian kian padat dan canggih dalam operasionalisasinya. Dari dampak yang ditimbulkan, telah mempengaruhi realitas jangkauan pasar industri telah mewabah keseluruh dunia melalui jaringan cyber multimedia digital termasuk Indonesia yang tak luput dari efeknya.

Gencarnya arus globalisasi dengan diikuti hadirnya kecanggihan teknologi di dalam penerapannya yang menerpa Indonesia, membuat lahirnya peradaban menuju kearah dunia barat. Lahirnya modernisasi di dalam masyarakat kita telah sedikit banyak merubah cara pandang dan pola hidup masyarakat, sehingga peradaban yang tercipta merupakan duplikasi budaya masyarakat barat yang cenderung berjiwa konsumtif dan hedonis. Berbagai macam fenomena kehidupan yang terjadi di lingkungan masyarakat dewasa ini, telah mengilustrasikan suatu keadaan yang mencerminkan layaknya kehidupan masyarakat dunia barat.

Pola ini memang sengaja dilakukan oleh para penguasa media yang melahirkan dan mempopulerkan pola hidup semacam itu lewat pengaruh produknya yang notabene sebagai cerminan kebudayaan lebih modern serta digembar-gemborkan melalui berbagai macam jejaring medianya hingga masyarakat bertekuk lutut, lalu meniru secara mentah-mentah tanpa adanya koreksi diri dari produk lansiran kaum kapitalis itu. Industri media yang menguasai jaringan cyber digital space itu, memang telah sengaja mengobrak-abrik tatanan hidup bangsa Indonesia yang terkenal satun itu, dan telah menjadi bagian dari jatidiri bangsa Indonesia selama ini, kini diganti dengan kebudayaan seronok, berperilaku rusak, dangkal pemikiran, berjiwa pragmatis, instan, konsumtif serta hedonis.

Realitas kehidupan yang terjadi dari masuknya arus globalisasi dengan intensitas tinggi itu, sedikit banyak berimplikasi pada sendi-sendi kehidupan bangsa yang dahulunya dikenal luhur budi pekertinya itu, kini telah teracuni oleh faham-faham yang datangnya dari luar. Dalam situasi bersamaan masuknya jaringan informasi digital international yang mengusung pernik-pernik kehidupan berdasar pada masuknya bermacam-macam ideologi diantaranya kapitalisme, liberalisme, materialisme, pragmatisme, hedonisme, telah menjilma menjadi sosok-sosok pencari sensasi kehidupan melalui jaringan cyber multimedia space berteknologi digital. Mudahnya pengaksesan situs-situs jaringan internet oleh insan negeri ini dari anak-anak, remaja, eksekutif muda, bahkan orang tua sekalipun pada situs-situs website jaringan international dengan kompleksitas *content* di dalamnya tanpa bisa lagi membedakan mana baik dan buruk termasuk mengantisipasi arus pergerakannya.

Pesatnya perkembangan teknologi informasi dalam arus globalisasi yang tinggi intensitasnya dan tidak diimbangnya dengan penanaman ideologi bangsa yang kuat dan kualitas pendidikan yang memadai dari penyelenggara negara pada rakyatnya, menyebabkan bangsa ini hanya melahirkan insan – insan yang gila akan pragmatisme dan konsumerisme, hingga bangsa ini telah menjadi bangsa berjiwa konsumtif dan hedonis yang gila akan barang-barang semata, tanpa

mau belajar bagaimana cara barang itu diciptakan dengan kualitas baik. Dari kenyataan ini, membuktikan bahwa dunia pendidikan kita tidak dirancang dandintegrasikan dengan dunia industri yang mengusung teknologi canggih, sebagai jalan menuju suksesnya kemandirian suatu bangsa, hingga masyarakatnya menjadi bodoh, karena tidak bisa berpikir dengan jernih mana yang baik dan mana yang kurang baik dalam memandang *global information* yang setiap detik hadir dan menyebarkan virusnya di tengah-tengah masyarakat kita. Lihatlah realitas kehidupan telah dipenuhi oleh sosok penyebar kebudayaan barat dengan posisi mendominasi dari budaya kelokalannya di tengah masyarakat. Tengok saja sekumpulan eksekutif muda dengan keharuman parfum wangi bunga sedap malam telah berdiskusi dalam suasana alunan musik klasik hasil gesekan biola Mozart di salah satu sudut ruangan “Americano Cafe” yang bergaya Amerika itu. Segerombolan anak muda berambut Punk, suatu gaya rambut model kulit duren dengan segudang atribut pernik-pernik dari metal itu, telah nongkrong dan bernyanyi ria di bawah jembatan layang jalan wakidun. Para remaja putri dengan pakaian seronok, bercelana ketat serta mengumbar pusernya terlihat jelas di pelataran Soeparno Plaza. Para pasangan ABG dengan model rambut ke coklat-coklatan mirip buah jagung yang membesar dari tangkainya itu, telah bermesraan dan berangkul seenaknya sendiri di tempat umum “Mbah Dipowinangun Plaza”, tanpa ada rasa malu di dalam dirinya. Banyaknya para ABG berperilaku liar duduk mojok ditempat sepi sambil tangannya cawal-cawil kesana kemari... ya... anda bisa bayangkan sendiri... apa yang telah dilakukannya... Begitu banyak fenomena-fenomena kehidupan yang terjadi di masyarakat baik remaja, eksekutif muda maupun orang tua dengan mentalitas paradok dari kehidupan seharusnya sebagai warga negara yang menjunjung budaya Indonesia sendiri dimana sopan santun dalam berperilaku diperlakukan di masyarakat.

## **I. Lunturnya Pancasila Sebagai Ideologi Bangsa**

Pancasila sebagai dasar sistem filsafat bangsa hendaknya dikembangkan sebagai “filsafat kritisal”, karena Pancasila sebagai satu satunya ideologi bangsa Indonesia mempunyai sifat terbuka dan dapat dikembangkan pemaknaan baru yang terkandung di dalamnya, hal ini sejalan dengan perkembangan pemikiran manusia yang selalu berkembang sesuai dengan tuntutan meningkatnya peradaban manusia.

Kenyataan ini berdasar bahwa Pancasila bukannya suatu ideologi bangsa yang bersifat konservatif, namun sebuah ideologi yang mampu membuka wacana pemikiran progresif dan membuka ruang kritik terhadap segala penyelewengan dan pengingkaran yang ada di dalamnya. Masalahnya adalah ketika suatu kritikan atau masukan yang dilontarkan kepadanya, tanpa pengkajian yang konstruktif dan tidak dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya, hingga ruang wacananya sering kali menyimpang dari dasar-dasar bahkan ada yang menentang, meragukan dan menolaknya. Ini adalah sikap yang tidak bisa diterima di dalam suatu kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat sementara tingkah laku atau perilaku yang ditampilkan tidak bercermin sebagaimana mestinya dan bertolak belakang dengan Ideologi Negeranya, padahal dia berharap hidup tenang dan bergantung kepadanya...!!!

Berikut ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan ketimpangan atau pengingkaran terhadap ideologi Pancasila melalui berbagai macam perilaku yang tumbuh dan berkembang dalam lingkungan masyarakat :

1. Apakah relevansinya semangat mengoreksi Ideologi kebangsaan, jika Masyarakat di dalamnya tetap berkehidupan menderita, miskin, dan serba susah ?.

2. Untuk Apa kita mencintai Negara kita sendiri, jika para pemimpin dan elit bangsa ini hidup berpoya-poya demi kemauan sendiri, sementara sebagian besar masyarakat lainnya hidup menderita dan tidak mampu memenuhi kebutuhan hidup yang layak ?.
3. Untuk Apa kita mencintai Negara kita sendiri, sementara para pemimpinnya serta para elit politik berkolaborasi dengan kekuatan asing mengeksplorasi kekayaan alam demi menguntungkan segelintir orang saja atau kelompok saja ?.
4. Untuk apa kita menghargai Negara atau kekuasaan, jika tindakan kriminal berbagai bentuk menyusup ditengah-tengah kehidupan dalam segala macam versi tanpa ada tindakan hukum yang berarti, hingga menyebabkan terpuruknya bangsa ini ?.
5. Untuk apa kami mengabdikan pada Bangsa dan Negara ini, jika negeri yang kami pijak tidak memberikan rasa keadilan yang tegas pada rakyatnya ?

Itulah pertanyaan-pertanyaan yang perlu adanya renungan tentang lunturnya semangat kebangsaan dan pemahaman ideologi bangsa seiring dengan kencangnya arus globalisasi yang melanda negeri ini, dan tanpa sadar merubah pola pikir dan gaya hidup kearah kebarat-baratan yang notabene sebagai masyarakat lebih modern. Tanpa disadari masyarakat dewasa ini, tidakkah masyarakat kita telah memilih dan memiliki orientasi baru dalam berpikir dan berperilaku ?. Suatu realitas kehidupan telah terlukis bahwa masyarakat dalam situasi dan kondisi bangsa yang serba kompleks dengan segala permasalahannya menyebabkan masyarakat menerapkan pola pikir yang pragmatis hingga melahirkan pragmdigma baru dalam berbangsa, bernegara dan bermasyarakat yang kebenarannya sangat diragukan dan dapat dikategorikan sebagai bentuk pengingkaran terhadap ideologi Pancasila sebagai pegangan hidup bangsa Indonesia. Dan ironisnya para pemimpin dan elit bangsa negeri ini terus melakukannya dengan beragam cara...!!! Sikap tanggap dan menumbuhkan semangat mengembangkan ideologi bangsa ini harus ditumbuh kembangkan guna menciptakan gagasan besar dalam menyikapi realitas kehidupan dewasa ini yang semakin mengglobal dengan kekompleksitan problematika dalam ruang keheterogenan masyarakat.

Semangat pemahaman dan pengembangan ideologi Pancasila akan terus melemah dan mungkin akan hilang dari pikiran masyarakatnya, jika para pemimpin dan elit pemegang kekuasaan negara tidak memberikan perlindungan kesejahteraan yang layak bagi rakyatnya. Permasalahan ini secara kasat mata telah berseliweran di depan mata kita, masalah upah/gaji pendapatan yang tak berimbang dengan kebutuhan hidup, terbatasnya lapangan kerja, masalah energi, BBM yang tumpang tindih dengan berbagai kepentingan dan rendahnya mutu pelayanan publik pada masyarakat serta rasa keadilan yang tak pernah hinggap pada insan negeri ini akan menjadi pemicu atas rendahnya kualitas pemahaman terhadap ideology Pancasila dan bukan tidak mungkin akan mengabaikan begitu saja keberadaanya. Selama penguasa tidak mampu mengelola negara dengan kualitas lebih baik dan efektif, maka akan menjadi suatu masalah besar bagi bangsa ini, karena kesemuanya itu akan menumbuhkan rasa apatis dan melemahnya kepercayaan rakyat terhadap negaranya sendiri, kalau sudah begini... terus mau apa untuk menaikkan pamor Pancasila sebagai satu-satunya pandangan hidup bangsa Indonesia tercinta?.

Fenomena atas tumbuh suburnya faham pragmatisme, konsumerisme, hedonisme serta kapitalisme dalam praktik-praktik sosial masyarakat akan terus menggulirkan suatu pertanyaan dan mengalirkan racunnya ke benak pikiran masyarakat sampai nantinya berkata, apa untungnya memikirkan rasa nasionalisme, semangat kebangsaan, pelestarian dan pengamalan ideologi Pancasila selama perut dari rakyat ini sangat lapar sekali... heeiii...?. Generasi muda Indonesia dewasa ini lebih cenderung berbicara gaya hidup ketimbang berbicara masalah nasionalisme dan kebangsaan serta ideologi negara. Hidup jujur dan tidak jujur sama saja hasilnya, berperilaku

sopan dan maling berdasi gak ada bedanya dan yang konyol lagi lebih baik menipu daripada tertipu. Berbicara rasa keadilan yang berujung pada penegakan hukum di Indonesia adalah semu belaka, karena pada kenyataannya para penegak hukum sudah menjadi actor perdagangan perkara, sehingga keadilan yang tercipta adalah menjadi alat komoditi kekuasaan. Kalau keadaan realitas kehidupan di Republik ini sudah begini, lalu untuk apa lagi kita mencintai negeri ini yang jelas-jelas mengenyangkan bagi kelompok-kelompok yang dekat dengan pengambil keputusan...?.

Rakyat Indonesia memang telah merebut kemerdekaan dari para penjajah dengan pengorbanan jiwa raga serta darah yang telah dilakukan oleh para pendiri bangsa ini sebelumnya. Apakah kemerdekaan warisan dari para pejuang dan pendiri bangsa ini dapat kita rasakan sekarang?. Kenyataannya kemerdekaan yang telah kita raih dengan susah payah tidak mampu menjamin kesejahteraan rakyatnya. Di balik kemerdekaan itu telah melahirkan tingginya kemiskinan, kebodohan, penjajahan manusia oleh manusia, diskriminasi, penggusuran rakyat yang lemah, praktik ketidakadilan, tindakan rasial, rendahnya kesejahteraan hingga pada akhirnya kemerdekaan belum memberikan nilai serta makna yang diharapkan.

Begitu banyak jargon-jargon yang diwacanakan sebagai bentuk perwujudan atas terciptanya kesejahteraan rakyat, namun realitasnya berkata lain. Kondisi bangsa ini justru mengalami keterpurukan begitu dalam hingga menimbulkan krisis nasional dalam skala multidimensi, hal tersebut disebabkan oleh tingginya praktik-praktik korupsi-kolusi-nepotisme yang berimbas atas lahirnya garong-garong dalam segala situasi dan kondisi. Banyaknya maling-maling berskala besar di tingkat atas para elit politik dan pemegang kekuasaan, merupakan wujud nyata dari pengingkaran dan penyimpangan atas ideology bangsa serta tatanan hidup yang telah dilahirkan oleh para pendahulu bangsa ini.

Dalam situasi dan kondisi seperti ini, masyarakat rawan dengan tindakan pragmatis dengan caranya sendiri, hal itu disebabkan timbulnya rasa kekecewaan terhadap ketidak mampuan negara dalam menciptakan kesejahteraan yang berpihak kepadanya, hingga pada akhirnya kehilangan jatidiri bangsa.

Dan “ketika terjadi krisis tentang jatidiri bangsa, maka masyarakat tidak peduli lagi tentang ideologi bangsanya, karena dianggap tidak berpihak kepadanya dan mencoba mencari-cari ideologi lain termasuk memuja-muja bangsa lain dari berbagai aspek yang mereka pahami dan dengan serta merta caranya sendiri, mereka terapkan dalam kehidupan sehari-hari” (Naya Sujana, 2008). Sebuah krisis jatidiri bangsa ini akan selalu tumbuh dan berkembang seiring dengan pesatnya arus modernisasi dan globalisasi yang menerjang negeri ini, sehingga faham-faham konsumerisme, pragmatisme, liberalisme, materialisme, kapitalisme dan hedonisme yang berasal dari dunia barat akan selalu meracuni masyarakat negeri ini dan lambat laun tercipta krisis moral dan ahklak yang berkelanjutan hingga timbul mental moralitas paradox yang melahirkan lingkungan masyarakat munafik.

Sejak keruntuhan rezim orde baru, masyarakat mempunyai sikap apatis dan enggan membicarakan ideologi bangsa Indonesia yaitu Pancasila, karena Pancasila dianggap gagal membentuk watak manusia Indonesia seutuhnya. Simulasi P4 dan penatarannya yang telah dilakukan sepanjang tahun tidak mampu atau dianggap gagal dalam menciptakan manusia yang ideal seperti harapan dari 36 butir makna-makna dalam Pancasila. Padahal diadakannya penataran P4 bertujuan sangat baik yaitu bangsa Indonesiamempunyai jiwa “Good Citizen and Strong Nation”. Namun masyarakat yang terlahir adalah justru sebaliknya, manusia-manusiaIndonesiakini berperilaku “Semau Gue”, ini jelas-jelas sebagai bentuk pengingkaran dari



ideologi bangsa yang semestinya. Realitas negeri ini dipenuhi oleh Jiwa-jiwa bengis saling tikam antar sesama, mental korup, sikap hedonis, otak garong, mulut penipu serta kata-kata lain yang intinya perilaku di luar kehendak dari makna-makna 36 butir penjabaran dari sila-sila Pancasila. Kita tidak bisa membedakan lagi siapa yang bertanggung jawab atas keadaan ini apakah salah oknum ataukah kelompok tertentu yang bermain atau... bahkan masyarakat kita semua ?. Sampai kini belum ada pernyataan resmi dari siapapun, dan yang terjadi adalah semuanya membisu, budeg dan tuli sengaja membiarkannya sampai bisul membesar hingga pecah berantakan.

## 2. Dimana Posisi Peran Seniman Berada ?

Masuknya arus globalisasi di Indonesia telah banyak menarik peran seniman dalam mewujudkan perubahan peradaban yang lebih tinggi. Banyak karya-karya para seniman baik fine art maupun applied art dalam kehidupan masyarakat. Lihatlah gedung-gedung pencangkar langit bertebaran dengan segala macam gaya arsitektur, termasuk interior di dalamnya. Gambar-gambar yang imajinatif terpampang diperempatan jalan protokol telah menggoda pikiran orang yang lewat di depannya. Spanduk, Billboard, iklan majalah, iklan koran serta iklan televisi dari berbagai macam tema telah mengantarkan para seniman untuk menunjukkan kemampuan dan eksistensinya di dalam lingkungan masyarakat. Demikian juga Acara-acara televisi yang kian lebih dinamis dan berfariatif dalam pengemasannya berbagai bidang ilmu disatukan dalam dinamisasi gambar hingga membuat masyarakat semakin ceria dalam melangsungkan kehidupannya. Bagaimana kekuatan televisi dapat menghadirkan musik secara live dan ditonton dalam waktu yang sama diseluruh wilayah Indonesia bahkan manca negara, demikian juga lewat acara pemberitaan gambar ekspresi para anggota DPR yang lari dari kursinya menuju ke mimbar ketua sambil gebrak meja, Ekspresi para ketua dan wakil ketua yang kalut dan ketakutan. Para anggota yang saling cacar, sikut dan jotos serta teriakan makian liar antar anggota merupakan kumpulan wajah-wajah ekspresi yang sulit di dapatkan, dalam sidang-sidang sebelumnya atau sesudahnya. Kesemuanya itu tampak hidup dan begitu nyata dalam penglihatan kita, sambil berkata "iki...opo...meneh...ngono... wong pendidikane duwur...kok kelakuane koyok... preman...???"... dasar...kadal buntung...lho anggota dewan...!!!. Saya memilihmu bukan untuk bertengkar dalam sidang, tetapi dapat menyuarakan kepentingan rakyat agar bisa hidup sejahterah...!!!.

Katheleen Hall Jamieson menyebut "kekuatan televisi ini sebagai dramatisasi dan sensasionalisasi isi pesan". Pada pandangan lain Irving Kristol menyebutkan "Apa yang dapat dilakukan oleh televisi, dengan kekuatan yang luar biasa, adalah memobilisasikan emosi pemirsa di sekitar gambaran dunia politik yang hidup, disederhanakan dan bersifat melodramatik di mana pujaan dan kutukan menjadi kutup-kutup magnetiknya". Pernyataan ini didasari dengan asumsi bahwa kekuatan televisi dapat membangkitkan pemirsa untuk meyakini suatu peristiwa yang mendramatisasi suasana lewat gambar-gambar yang telah direduksi hingga menimbulkan suatu pertentangan dan pujian diantara persepsi yang ditimbulkan. Visualisasi suatu peristiwa yang terjadi di masyarakat dan disiarkan melalui tayangan televisi, sebetulnya bukanlah suatu realitas yang sebenarnya seperti ketika kita menangkap obyek tepat di depan mata. Deretan ribuan bahkan jutaan *frame-frame* dari realitas itu merupakan sesuatu yang sudah diolah dan dikemas sedemikian rupa hingga pemirsa tanpa sadar bahwa gambar yang dilihatnya itu adalah suatu kebohongan yang tersembunyi. Inilah kesamaan yang diungkapkan oleh "kaum Aliran Marxisme Frankfurt tentang kesadaran palsu berdasar pada Penguraian penciptaan ide yang palsu tentang berbagai nilai serta makna yang ada didalamnya serta hubungan sosial di dalam lingkungan masyarakat dibentuk oleh kekuasaan media". (Graeme Burton. 2008).

Ditengah perekonomian yang dikuasai oleh para kelompok-kelompok kapitalis, membuat perekonomian nasional yang mengusung usaha kecil menengah makin terjepit posisinya dan pada saat yang kurang menguntungkan nanti akan terlempar dari lingkungannya. Suatu contoh dalam industri budaya khususnya televisi, dapat dilihat betapa kuat industri-industri yang menguasai perekonomian di negeri ini tergambar dalam iklan televisi dan dapat menciptakan permainan pasar hingga masyarakat tunduk tanpa perlawanan yang berarti. Kesemuanya itu merupakan ide dan perwujudan dari peran seniman dalam membangun peradaban Indonesia ke taraf yang lebih maju, hingga kehidupan masyarakat terlihat lebih hidup dan dinamis daripada sebelumnya. *"cerita sinetron tidak hanya sekedar menjadi sajian menarik di layar kaca, tetapi juga sebagai bahan diskusi atau bahan ngrumpi diantara para ibu di kelompok arisan, antara anggota keluarga, bahkan tidak jarang nilai-nilai sosial yang ada di dalam tayangannya sebagai rujukan perilaku para penggemarnya"* (Labib, 2002). Demikian juga acara-acara televisi yang senang digandrungi para pemirsa negeri ini telah dikuasai oleh kelompok-kelompok kapitalis yang mementingkan kelompoknya sendiri tanpa memperdulikan dampak dari produk yang ditayangkan. Dari kenyataan ini mengisyaratkan bahwa posisi seniman terpecah menjadi dua bagian. Bagi mereka yang haus dengan popularitas dan hidup yang layak, maka mau tidak mau karya-karyanya turut mengikuti perusahaan yang cenderung ke arah kapitalis dengan produknya kearah *"Budaya Populer"* dimana keberadaan dari produk ini memang sangat digandrungi masyarakat dewasa ini terutama generasi mudanya. Dari sini karya-karya yang dihasilkan hanyalah produk murahan, dimana perancangan dan pengekskusiannya kurang memperhatikan segi kualitasnya, yang terpenting di dalam benaknya bagaimana produk ini laku keras dipasaran anak muda terlepas dari efek bahaya dan tidaknya dari produk tersebut pada masyarakat, sehingga hasil karya-karyanya tak ubahnya seperti produk sampah bertebaran dalam lingkungan masyarakat yang memang menyenangi produk sampah tersebut hingga masyarakatnya menjadi masyarakat sampah dibalik kemegahan peradaban sampah dalam kacamata ideologi Pancasila.

Hasil Perencanaan program acara yang ditayangkan oleh televisi, khususnya sinetron atau film televisi hanyalah mengangkat tentang keglamoran hidup dengan pernik-pernik peradaban modern akibat salah mempersepsikan makna modernisasi akibat kebobrokan dan ketololan masyarakat itu sendiri dalam menyikapi hadirnya arus globalisasi. konsep rancangan program acara hanyalah berorientasi pada pola hidup pragmatis, konsumtif, hidonis, dengan mengupas permasalahan kehidupan dengan menonjolkan visualisasinya ke arah mengumbar adegan intimidasi, cucuran air mata, persekongkolan, perselingkuhan, percintaan, dimana pesan moral di balik tayangan tersebut sangat membahayakan dampaknya pada psikologi generasi negeri ini yang rawan dengan peniruan untuk kemudian disebrluaskan kepada teman-temannya dan menjadi jatidiri bangsa yang katanya lebih modern... weeee... itu kata siapa duuuulll...?. Karya-karya sinetron dan film televisi selama ini hanyalah sebagai produk komoditas dari industry televisi, dimana penerapan ideologi media tak lepas dari nafas produksi tayangannya itu, hingga pada akhirnya nanti produk itu cepat laku dipasaran dan tanpa memperdulikan dengan misi sosialnya lagi.

Konsep cerita yang dihadirkan selalu minim dengan penggunaan daya nalar tinggi, dimana nantinya sangat membantu sebagai misi pencerahan hidup masyarakat, sehingga tayangan tersebut sangat diperlukan guna memberikan rangsangan pemikiran yang nantinya bisa menimbulkan tumbuhnya sikap moralitas pada kehidupan masyarakat ke arah lebih baik. Karena sebuah film padasnya *"la dapat menghibur, mendidik, melibatkan perasaan, merangsang pemikiran dan memberikan dorongan, namun juga dikawatirkan menjerumuskan orang ke hal-hal yang negatif serta meruntuhkan nilai-nilai moral dan tatanan hidup yang ada di*

tengah masyarakat” (Marselli, 1996). Namun pada kenyataannya rekaman realitas media telah menunjukkan bertolak belakang dari seharusnya, bahwa dialog-dialog skenario cerita sinetron televisi kebanyakan didominasi dengan gaya bahasa populer, dimana gaya bahasa hanya mengumbar masalah gaya hidup semata dan lari dari bahasa kecerdasan dengan mengusung daya nalar tinggi dalam pengekskusiannya itu, karena dianggap akan mempersulit dalam memproduksi serta tidak laku di pasaran. Visualisasi dalam bahasa gambarpun kadang menimbulkan kejanggalan. Cerita seorang direktur suatu perusahaan, tetapi minim di visualisasikan tentang perannya dalam mengendalikan perusahaannya di kantor. Bagaimana mungkin usaha makanan kecil semacam donat memiliki rumah mewah dan bermobil BMW serta banyaknya kejanggalan visualisasi cerita beredar luas dari menit ke menit sehingga tanpa sadar telah menciptakan pembohongan publik di masyarakat. Scene-scene yang divisualisasikan hanyalah kegiatan-kegiatan hura-hura, ngerumpi, dugem, jalan-jalan dan acara belanja di plaza atau mall, jarang ditemui scene-scene dengan karakter berceritakan suatu pembelajaran di kampus, misalnya suasana belajar di kelas dengan diselingi perdebatan antar mahasiswa, dosen memberikan menjelaskan perkuliahan secara detil tentang suatu matakuliah, kegiatan praktikum di laboratorium, diskusi antar mahasiswa dalam forum seminar atau kegiatan Badan Eksekutif Mahasiswalainnya. Para kreator bidang audio visual kita sebagian besar hanyalah budak-budak kapitalis dengan karya kejar tayang dan berkonsep ala kadarnya di tengah situasi dan kondisi masyarakat yang dikendalikan oleh para pemegang kekuasaan beorientasi pada ideologi kapitalisme.

Dalam konteks perfilman, Film dinilai selain sebagai alat untuk mencurahkan ekspresi bagi penciptanya, juga dianggap sebagai alat komunikator efektif dalam mempengaruhi perilaku masyarakat. ”Hal inilah tak terpikirkan sebagian besar orang, bahwa film dapat menghibur, mendidik, melibatkan perasaan, merangsang pemikiran dan memberikan dorongan pada para pemirsanya, namun juga dikhawatirkan menjerumuskan orang ke hal-hal yang negatif serta meruntuhkan nilai-nilai moral dan tatanan hidup yang ada di tengah masyarakat” (Marselli, 1996). Sekian jauh perfilman nasional Indonesia tumbuh dan berkembang, namun kenyataannya perkembangan perfilman nasional kita tidak mampu sebagai sarana pencerahan hidup masyarakat, malah sebaliknya keberadaan film nasional kita dianggap sebagai provokator atas keruntuhan tatanan moral semakin dalam di tengah masyarakat, bahkan perfilman nasional kita dianggap sebagai penyebar kemesuman dibalik gambar-gambar seronok, pengumbaran aura, pakian minim dengan pengadegan fullgar telah beredar luas di pampang dalam poster raksasa berdiri tegak dipinggir jalan diantara jutaan masyarakat Indonesia di setiap kota, sampai-sampai pengendara motor lengah dikarenakan matanya melotot terhadap sensasi gambar tersebut dan akhirnya menabrak orang jualan dawet hingga berantakan...Iha gimana tu...mata...?. Inilah karya anak negeri ini dengan pikiran begitu dangkal telah menghadirkan kemaksiatan dalam penciptaan sebuah film hingga menghsilkan karya murahan, dan hanya sekedar meramaikan hiburan di kalangan masysrakat yang memang haus akan hiburan. Mudahnya ijin produksi film di negeri ini, dengn alasan memberikan semangat atas bangkitnya perfilman nasional. Tetapi perlu diingat apa manfaatnya jika film yang diproduksi itu menyebarkan kemesuman dalam produksi film, hingga nantinya akan mempengaruhi psikologi masyarakat ke arah negatif. Untuk apa karya film itu ada jika nantinya hanya sebagai penyebaran virus hingga mengantarkan masyarakat Indonesia ke pintu gerbang era peradaban setann... Alasss... !!! Bangsa ini sedang mengalami sakit dalam taraf stadium tinggi, perlu obat penyembuh berupa tayangan-tayangan dengan mengusung perangsangan pemikiran, mengandung dorongan semangat kebangsaan, pengaktualisasian nilai-nilai moral tinggi, penerapan nilai-nilai sosial masyarakat, pengaplikasian teknologi canggih agar bangsa ini bisa bangkit kembali dari sakitnya. Lihatlah judul karya-karya

film anak negeri ini telah didominasi konsep film penyesatan seperti Tali Pocong Perawan, Pocong Kamar Sebelah, Pocong Goyang Pinggul, Kuntul Anak beranak, Rintihan Kuntul anak Perawan, Beranak Dalam Kubur, Diperkosa Setan, Suster ngesot, suster keramas, serta yang lainnya, mungkin beberapa hari kedepan akan lahir lagi Garukan Nikmat Suster Gatel... weee.... !!!.. Dari judulnya saja kita sudah muak... membacanya... apalagi melihatnya... Ueeekkkk... !!!.

Karena peredaran film kemesuman dibalik keklenikan tidak mengalami kesulitan dalam memproduksinya dan pengedarannya di masyarakat, maka produser bersama crewnya berencana mendatangkan bintang-bintang film porno dunia untuk main di Indonesia....weee...edan tenan kuwi.... Tetapi anehnya Pemerintah melalui lembaga yang berwenang membiarkan saja ide yang super edan, gendeng, kenthir dan goblok itu diproduksi dan diedarkan ke masyarakat dengan label Lolos Sensor...!!!. Harusnya sineas-sineas itu bercermin diri... mengapa kita tidak mencontoh kesuksesan film-film Amerika yang laku keras di pasaran, harusnya kita belajar dari kesuksesan bangsa lain...bila perlu tenaga profesional dikirim ke Amerika untuk belajar dan ilmunya bisa untuk membangun perfilman Indonesia ke arah lebih baik... bukan mendatangkan bintangnya apalagi bintang porno... dasar otak goblok...

Lembaga Sensor Film Indonesia atas nama pemerintahan seharusnya pekah terhadap fenomena ini, dan tidak membiarkan para pengusaha lewat produksi film dengan cara seenaknya sendiri hingga menimbulkan polemik berkepanjangan tanpa ada hasil. Pada kenyataannya lembaga ini tidak mempunyai nyali besar untuk bertindak tegas, atas permainan para industri film melalui beragam karyanya yang semakin lama tindakannya mengarah pada penyesatan kehidupan masyarakat. Lembaga Sensor Film Indonesia yang kita miliki diambang sangat dilematis, peran lembaga ini di tengah tarik menarik antara pembuat film dan kepentingan perkembangan hidup masyarakat. Disatu pihak melindungi masyarakat terhadap ekses-ekses negatif dari pengaruh film dan dipihak lain menjadi penghambat kreatifitas perkembangan produksi film. Kepentingan masyarakat jauh lebih utama daripada melindungi segelintir pemilik modal yang otaknya keblinger dalam memproduksi sebuah film, toh hasilnya...Apa...?, malah meracuni dan menyesatkan kehidupan masyarakat.

## **Penutup**

Kekuatan arus globalisasi yang bergulir di tengah masyarakat hingga saat ini dengan segala dampaknya, akan terus mengalir bagai air terjun ke tempat yang lebih rendah tanpa ada arahan dari siapapun, dan semua berjalan sebagaimana mestinya. Demikian juga dengan peradaban dari luar akan terus hadir bersamaan dengan datangnya arus globalisasi beserta dampaknya itu, akan selalu mengancam kebudayaan lokal melalui jejaring cyber multimedia digital menembus jiwa-jiwa penggunaannya dan akan terus menyerang siapa saja mangsanya entah anak-anak, remaja maupun orang tua sekaligus. Kita tidak menutup mata atas datangnya kebudayaan luar hadir di tengah-tengah kita, namun perlu adanya pengkajian secara mendalam tentang baik dan buruknya, hal tersebut dikarenakan ideologi negara yang membedakannya. Kemajuan teknologi dari dunia barat itu jauh lebih baik kita jadikan contoh untuk ditirukan dipelajari guna membangun negeri ini dari segala macam disiplin ilmu, karena teknologi kita jauh lebih baik dari mereka, mengapa kita harus malu...!!!. Kesuksesan suatu bangsa dalam membangun peradabannya adalah belajar dari kesuksesan bangsa lain dalam membangun peradabannya. Ada suatu istilah bernama "Local Genius" yaitu kemampuan suatu bangsa untuk menerima kebudayaan bangsa lain, kemudian disesuaikan dengan kepribadian bangsa itu sendiri hingga

melahirkan suatu kebudayaan baru tanpa mengurangi jatidiri bangsa itu sendiri. Inilah yang perlu kita jadikan pegangan kuat dalam mengakulturasikan kebudayaan luar dengan kebudayaan kita hingga melahirkan kebudayaan baru tanpa pengurangan dari jatidiri bangsa Indonesia dengan Pancasila sebagai jiwa raganya itu.

Persoalan besar yang dihadapi oleh bangsa Indonesia hingga sekarang ini adalah kurangnya pembudayaan dan aktualisasi nilai-nilai Pancasila yang tidak berjalan secara efektif dan mendasar. Karena itulah Pancasila tidak dapat muncul keberadaannya dalam ruang dan perilaku yang nyata dari setiap warga negara negeri ini. Keberadaan Pancasila selama ini hadir hanyalah sebagai tema dan semboyan semata-mata dalam setiap perilaku kehidupan masyarakat. Bagaimana mungkin kita mampu mewujudkan atau melahirkan dan mengembangkan semangat kebangsaan dan pengagungan Ideologi bangsa dengan baik, jika aktualisasi nilai-nilai Pancasila itu dangkal dan kandas oleh persepsi setiap warga negara negeri ini sendiri ?. Kemunculan semangat itu akan hadir dengan sendirinya, selama nilai-nilai Pancasila itu dimaknai secara mendalam dan menyerap dalam jiwa dan raga serta dilaksanakan secara konsisten oleh setiap warga negara Indonesia. Suatu contoh kongkrit adalah semangat kebangsaan yang tinggi di tanam dalam jiwa setiap prajurit TNI, termasuk Ideologi bangsa Indonesia yaitu Pancasila yang selalu ada dalam jiwa dan raganya bahkan setiap prajurit TNI rela mati demi untuknya. Seandainya setiap warga negara mempunyai jiwa seperti ini, niscaya Indonesia tidak akan jadi begini keadaannya.

Kalau di kaji dengan pikiran jernih dan intelektualitas tinggi, Pancasila tidak perlu diragukan lagi existensinya. Para pendahulu pendiri bangsa ini telah bertahun-tahun mengujinya, walaupun selama ini tidak bisa menunjukkan hasilnya itu dikarenakan orang yang mengelolanya tidak mampu mengaktualisasikan secara benar, dan bukan Pancasila yang dipersalahkan. Paradigma masyarakat selama ini dalam menyikapi Pancasila selalu bersikap sinis terhadapnya, ini harus diluruskan dan di arahkan ke jalan yang benar, sehingga masyarakat bisa menghayati dan mengamalkannya secara konsisten agar bangsa ini bisa bangkit kembali dari keterpurukan. Sejalan dengan hal itu maka perlu adanya upaya pembangunan jatidiri bangsa pada setiap warga negara Indonesia, karena dengan memiliki jatidiri bangsa berlandaskan Pancasila, maka kemandirian suatu bangsa akan tercipta dengan sendirinya.

Demikian juga tayangan televisi dengan pengaruhnya sangat dahsyat terhadap psikologi masyarakat, karena media yang satu ini selain murah meriah, namun dampaknya, dapat mempengaruhi sugesti masyarakat hingga apa yang mereka terima jadi bahan renungan dan kajian untuk berbuat sesuatu dikemudian hari sampai pada suatu saat akan di jadikan jatidiri. Tidak semua tayangan dari televisi adalah cerminan suatu realitas kehidupan kongkrit, namun kebanyakan adalah hasil manipulasi dari beragam kepentingan dari kelas-kelas dominan negeri ini. Banyak segala aktifitas yang kita perbuat entah itu kebaikkkan atau keburukkan bersumber dari apa yang pernah ditonton lewat televisi.

Dalam aspek perfilman, Pemerintah melalui Badan Sensor Film harus bertindak tegas dan larang segala film yang berorientasi pada penggambaran nafsu lewat sensasi gambar-gambar fullgar dalam selipan film keklenikan yang berakibat apada penyesatan masyarakat. Kalau tidak ada ketegasan maka mereka akan terus berbuat lebih parah lagi hingga memalukan bangsa ke tingkat international dengan menyajikan film rendahan itu. Demikian juga dengan karya film yang mengangkat masalah sosial berupa kritikan pada penyelenggara negara jangan dianggap sebagai musuh, oleh karena itu kita semua haruslah sadar dan jernih melihatnya, sesuatu yang terlontar dalam rana publik dan beruba menjadi wacana, bukanlah dianggap sebagai lawan yang merongrong kewibawaan pemerintah atau institusi lainnya, hingga berdampak pada saling

menyerang antara kepentingan satu dengan kepentingan lainnya. Keberadaan mereka dalam menyuarakan kepentingan sosial masyarakat merupakan kecintaan dia terhadap nasib bangsa Indonesia kedepan.

Sudah menjadi kewajiban kita bersama, khususnya kalangan yang berpendidikan tinggi saling mengingatkan, bahwa tak semua tayangan yang tercermin di dalam televisi maupun film serta gambar-gambar periklanan yang beredar di tengah masyarakat mempunyai nilai kebaikan, bahkan ada isi tayangan baik televisi maupun film tersebut dapat menyesatkan kehidupan masyarakat dan hal itu dibiarkan oleh yang berwenang hingga menimbulkan polemik berkepanjangan. Kini tergantung kita semua bagaimana menyikapinya. Diperlukan tindakan tegas oleh Komisi Penyiaran Indonesia dan Lembaga Sensor Film Indonesia selaku penjaga gawang kepada para stasiun televisi dan industri film, jika terbukti melanggar aturan yang telah ditentukan dan disepakati bersama, dampak negatif dari peredaran siaran televisi dan film dapat ditekan seminimal mungkin.

### **Daftar Pustaka :**

- Burton, Graeme. 2008. *Media dan Budaya Populer*. Penyadur: Alfathri Adlin. Yogyakarta: Jalasutra.
- Labib, Muh. 2002. *Potret Sinetron Indonesia: Antara Ralita Virtual dan Realitas Sosial*. Jakarta: MU:3.
- Susanto, AB. 2001. *Potret-Potret Gaya Hidup Metropolis*. Jakarta: Toko Buku Kompas Media Nusantara.
- Rahardi, Kunjana. 2000. *Renik-Renik Perabdban*. Yogyakarta: Duta Wacana Univercity Press.
- Storey, Jonh. 2003. *Teori Budaya dan Budaya Pop: Memetakan Lanskap Konseptual Cultural Studies*. Penyunting: Dede Nurdin. Yogyakarta: Qalam.
- Barker, Chris. 2004. *Cultural Studies: Teori dan Praktik*. Penerjemah: Nurhadi. Yogyakarta: Kreasi Wacana.
- Surbakti, EB. 2002. *Awas tayangan Televisi: Tayangan Misteri dan Kekerasan Mengancam Anak Anda*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Riswandi. 2009. *Dasar-Dasar Penyiaran*. Jakarta: Graha Ilmu.
- Mulyana, Dedi, Idi Subandi Ibrahim. 1997. *Bercinta dengan Televisi*. Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Arifin, Eva. 2010. *Broadcasting: To Be Broadcaster*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Marlin, Randal. 2002. *Propaganda and The Ethics Persuasion*. Canada: Broadview Press.
- Ellul, Jacques. 1973. *Propaganda : The Formation of Mens Attitudes*. Vintage Books.
- Naya Sujana. I Nyoman dan Lasmono Askandar (ed). 2005. *Jatidiri Bangsa Indonesia*. Surabaya: DHD 45 Jawa Timur.
- Panuju, Redi. 2011. *Studi Politik Oposisi dan Demokrasi*. Yogyakarta : Interprebook.
- Djoko Damono, Sapardi. 2009. *Kebudayaan (Populer) disekitar Kita*. Jakarta : Kompleks Dosen UI.
- Dale, Edgarv., 1991, *How to film appreciated Motion Pictures*, New York, Arno Press Fourt edition.
- Monaco, James., 1981, *How to Read a Film*, New York, Oxford University Press, revised edition
- Sumarno, Marselli., 1996, *Apresiasi Film*, Jakarta, Grasindo
- Effendy, Heru., 2002, *Mari Membuat Film*, Jakarta, Konfiden
- Atmaja, Tony., *Makalah Video and special effect for broadcasting in digital era*, Jakarta 2002
- Baksin, Askurifal., 2003, *Membuat Film Idie itu gampang*, Bandung, Kartasis
- Wheeler, Fleming., 1980, *Art Since Mid Century*, TheVendeme Press, New York, Rosenberf

# Esensialisme Kebudayaan dan Pragmatisme Politik

---

UNTUK waktu yang sangat lama pemikiran ilmu sosial dan kalangan politik dikuasai oleh gagasan esensialis tentang kebudayaan. Secara sederhana dalam gagasan itu diandalkan dan dipercaya begitu saja, bahwa kebudayaan terdiri dari nilai-nilai dan norma-norma yang telah selesai, mantap, baku dan berdiri sendiri.

Yang diabaikan dalam gagasan esensialis adalah peranan para pendukung kebudayaan dalam memberi bentuk dan isi kepada kebudayaan mereka. Asumsi yang dianut adalah bahwa tingkah laku sekelompok orang akan tergantung kepada nilai-nilai dan norma-norma kebudayaan yang dianutnya. Jadi, untuk mengubah tingkah laku budaya perlulah diubah terlebih dahulu seluruh perangkat nilai dan norma kebudayaan yang menjadi pedoman bagi tingkah laku budaya.

Pemikiran seperti itulah yang saya kira telah menjadi dasar kerisauan saudara Mohamad Muzamil dalam artikelnya berjudul *Perubahan Nilai atau Budaya Politik?* (Kompas, 24 Maret 1998). Pertanyaan yang diajukannya kepada saya sedikit-banyaknya mencerminkan pemikiran kaum esensialis: "Apakah sistem nilai politik yang berlaku saat ini menyimpang dari sistem nilai yang telah diyakini kebenarannya oleh bangsa Indonesia sehingga perlu adanya perubahan menyeluruh terhadap sistem nilai? Ataukah yang terjadi saat ini adalah penyimpangan budaya dari nilai-nilai dasar yang dimiliki oleh bangsa Indonesia?"

Dalam pertanyaan yang simpatik ini diandaikan bahwa ada sistem nilai yang telah selesai dan baku (yaitu "*yang telah diyakini kebenarannya oleh bangsa Indonesia*"). Demikian pun kalau ada penyimpangan dalam budaya politik maka itu hanyalah penyimpangan budaya dari nilai-nilai dasar yang dimiliki bangsa Indonesia.

Dalam pemikiran tersebut dibedakan dan bahkan dipisahkan dengan jelas tingkah laku pendukung suatu kebudayaan dari nilai-nilai dan norma-norma kebudayaan yang diandaikan baku, selesai, sempurna, dan tak tersentuh lagi oleh pengaruh tingkah laku budaya dalam kehidupan nyata. Ada semacam kepercayaan yang bersifat platonis bahwa nilai dan norma-norma budaya berada pada sebuah "dunia ide-ide" yang otonom, sedangkan tingkah laku budaya hanya merupakan pantulan dan tiruan yang kurang sempurna dari dunia ide tersebut. Kalau ada yang menyimpang dalam kebudayaan maka yang harus diubah adalah tingkah laku budaya dan bukannya nilai dan norma-norma kebudayaan. Secara populer pemikiran ini terlontar dalam ungkapan yang acap terdengar: jangan salahkan kebudayaan, tapi salahkanlah orangnya!

\*\*\*

KALAU manusia dibentuk oleh kebudayaannya, maka seseorang menjadi Jawa karena kebudayaannya, demikian pun seseorang menjadi Minang karena kebudayaannya. Seorang Jawa yang sejak kecilnya hidup di Jepang di tengah-tengah keluarga Jepang akan menjadi Jepang secara budaya. Gagasan ini kemudian diperkuat oleh antropologi budaya yang menyelidiki kebudayaan suatu kelompok budaya. Kalau seorang peneliti datang ke Mentawai misalnya, maka yang menarik dia adalah bagaimana pola-pola kebudayaan orang Mentawai saat itu, dan bagaimana orang-orang Mentawai hidup menurut nilai-nilai dan norma-norma yang mereka anut. Peneliti tersebut telah menerima kebudayaan Mentawai sebagai barang-jadi yang sudah ada, sudah terbentuk, dan hanya memperhatikan bagaimana pola-pola kebudayaan tersebut bekerja dalam kehidupan sehari-hari.

Yang sering tidak dipersoalkan adalah bagaimana orang Mentawai membentuk kebudayaan mereka. Bagaimana sejarah mereka mempengaruhi terbentuknya pola-pola kebudayaan mereka, dan bagaimana pembangunan dan politik Indonesia saat ini mendesak beberapa perubahan dalam kebudayaan mereka. Prof Reimar Schefold dari Universitas Leiden, yang semenjak tahun 1970-an menyelidiki kebudayaan Mentawai, menemukan bahwa dewasa ini ritual-ritual keagamaan dan tabu-tabu orang Sakuddei di Kepulauan Mentawai menjadi jauh lebih rumit dari sebelumnya. Dengan ritual seperti itu orang luar menjadi sulit sekali masuk karena ritual-ritual itu menjadi sulit dipahami, sulit ditembus, menjadi lebih hermetic.

Terjadi semacam involusi keagamaan dan involusi ritual. Menurut peneliti ini, pengrumitan ritual itu dimaksudkan untuk melindungi orang Mentawai dan masyarakat Mentawai dari penerobosan oleh program-program pembangunan yang kini dijalankan secara nasional, dan yang dalam banyak kasus menyudutkan mereka pada posisi sulit. Perumitan ritual dimaksudkan sebagai benteng untuk melindungi orang-orang Mentawai dari pengaruh-pengaruh luar yang demikian gencar dan luas.

Terlihat di sini bahwa bukan hanya kebudayaan yang membentuk sifat orang dan masyarakatnya, tetapi sebaliknya pendukung suatu kebudayaan secara aktif memberi bentuk dan isi kepada kebudayaan mereka. Kebudayaan tidak cukup hanya dipandang sebagai nilai dan norma tetapi dapat dan harus juga dipandang sebagai wacana, yaitu sebagai hasil bentukan dan hasil konstruksi sosial dari sekelompok orang dalam mencari orientasi kepada lingkungan hidupnya. Konsepsi bahwa manusia dibentuk oleh kebudayaan kini diimbangi secara meyakinkan oleh konsepsi lain bahwa kebudayaan juga dibentuk oleh para pendukungnya.

Dengan demikian sulit sekali mengatakan bahwa ada nilai-nilai, norma, atau pola kebudayaan yang boleh dianggap selesai, baku dan tak berubah lagi karena "telah diyakini kebenarannya" oleh semua orang. Kebudayaan, pada dasarnya, bukanlah soal kebenaran, tetapi soal praktek dan kebiasaan. Kalau kekerasan terus-menerus dipraktikkan, maka lambat laun dia akan dibudayakan (sekalipun hal ini tak pernah dapat dibenarkan!).

\*\*\*

DALAM sebuah negara modern proses konstruksi sosial kebudayaan itu berlangsung juga (dan terutama) dalam apa yang dinamakan budaya politik. Tingkah laku elite politik, bisa sesuai dengan nilai-nilai umum yang dianggap luhur, tetapi bisa juga menyimpang daripadanya. Dalam kedua keadaan itu, apakah dia sejalan atau menyimpang, tingkah laku itu tetap mempunyai kekuatan yang besar dalam membentuk kebudayaan. Jadi kalau korupsi, kekerasan atau nepotisme hidup subur dalam politik, dia membentuk budaya politik itu, yang kalau meluas, dapat juga mengubah kebudayaan. Tanpa ada perlawanan dan kritik terhadap praktek-praktek tersebut, maka korupsi, kekerasan dan nepotisme dalam suatu budaya politik akan diterima sebagai bagian kebudayaan dan bukan sekadar penyelewengan daripadanya.

Jadi apakah nilai-nilai dalam politik Indonesia sesuai atau menyimpang dari apa yang oleh sdr Mohamad Muzamil dinamakan nilai-nilai luhur, kedua proses itu tetap mempunyai pengaruh yang konstitutif terhadap kebudayaan Indonesia. Anggapan bahwa ada nilai-nilai yang tak tersentuh, dan ada tingkah laku budaya yang menyimpang, yang tidak kena-mengena dengan nilai-nilai luhur tersebut, adalah suatu jalan pikiran esensial yang melihat kebudayaan sebagai dunia platonis yang berada di luar sejarah.

\*\*\*



PERTANYAAN yang sangat menarik adalah mengapa gerakan pemikiran esensialis tentang kebudayaan ini demikian dominan? Secara ilmiah, hal ini jelas merupakan pengaruh positivisme yang memandang kebudayaan sebagai given, barang-jadi yang bisa diteliti secara empiris gejala-gejala dan pola-polanya. Positivisme hanya sanggup menangkap kehadiran sebuah kebudayaan dengan pola-polanya sebagaimana sudah terbentuk. Namun, dia gagal menangkap proses pembentukan kebudayaan itu.

Dalam proses pembentukan tersebut (yaitu dalam konstruksi sosial kebudayaan) akan terlihat kekuatan-kekuatan, kepentingan-kepentingan dan berbagai ide yang membentuk suatu kebudayaan dalam suatu konteks sejarah yang konkret. Setiap kebudayaan ada riwayat hidupnya, dan konstruksi sosial adalah semacam biografi tentang kebudayaan bersangkutan.

Dari segi itu dapat dipahami mengapa penjajah Belanda dulu selalu mempropagandakan bahwa pribumi adalah orang-orang malas. Dengan mengatakan bahwa pribumi pada dasarnya malas, maka seluruh tanggung jawab terhadap kemiskinan dan kemelaratan di daerah koloni dibebankan kepada pribumi yang tidak mau bekerja keras, sementara seluruh usaha kolonial dalam mengeruk kekayaan Indonesia untuk dibawa ke luar tidak lagi disinggung-singgung. Di sini kebudayaan orang-orang pribumi dibangun dalam satu wacana dengan citra yang membela dan menyelamatkan kepentingan kolonial dan kekuasaan kolonial.

Dalam politik praktis, esensialisme kebudayaan ini pun banyak manfaatnya. Di sini diajukan dua strategi pemanfaatannya. Pertama, dengan menganggap bahwa ada nilai-nilai dan norma yang sudah selesai dan sempurna sebagai barang-jadi, segolongan orang yang kebetulan berkuasa merasa dapat menguasai dan bahkan memonopoli nilai dan norma tersebut, seperti memonopoli penjualan minyak atau kertas misalnya. Golongan ini merasa dapat menentukan praktek mana yang sesuai dengan apa yang dinamakan nilai luhur dan mana pula yang bertentangan, tanpa ada kemungkinan diskusi atau diskursus mengenai tindakan tersebut.

Kedua, kalau kemudian terjadi banyak penyimpangan maka hal tersebut selalu dapat dinetralisir dengan merujuk terus-menerus kepada apa yang dianggap penyelewengan yang sedang terjadi di depan mata. Esensialisme, sampai tingkat tertentu, membebaskan orang dari beban menanggung hipokrisi, karena kepercayaan yang diciptakannya sendiri, bahwa tindakan dan tingkah laku budaya adalah satu hal, sedangkan nilai budaya adalah hal lainnya. Begitulah, seseorang mengambil dan memanfaatkan uang negara untuk kepentingan dirinya, sambil tetap dengan anggun berbicara tentang nilai-nilai kejujuran dan pengabdian tanpa pamrih untuk nusa dan bangsa.

Yang dilupakan di sana ialah bahwa tindakan dan tingkah laku budaya selalu mempengaruhi kebudayaan, dan bahwa nilai-nilai luhur dalam kebudayaan hanya mungkin ada kalau kita membuatnya luhur. Sebaliknya, nilai-nilai itu akan babak-belur atau hancur-lebur kalau tingkah laku itu bagaikan "*jauh panggang dari api*".

Secara singkat: esensialisme kebudayaan adalah argumen pragmatis untuk menghindari tanggung jawab kebudayaan dalam politik dengan cara memisahkan tingkah laku budaya dari nilai-nilai kebudayaan, dan karena itu menafikan akibat tingkah laku budaya terhadap pembentukan kebudayaan. Pandangan konstruksionis tentang kebudayaan dapat menyingkapkan distorsi yang sering muncul dalam kesadaran: orang yang tak sanggup melakukan apa yang dipercayainya, akan cenderung percaya pada apa yang dilakukannya.

**Ignas Kleden**

# KESENIAN DAN SIMBOLISME KEBUDAYAAN

---

BARANGKALI suatu truisme untuk mengatakan sekali lagi kesenian adalah bagian kebudayaan. Namun demikian, beberapa implikasi kebenaran tersebut mungkin perlu dibicarakan lagi sebagai kerangka umum untuk meninjau kedudukan kesenian dan perkembangannya di Indonesia kini dan hubungannya dengan perkembangannya sosial. Sebagai bagian kebudayaan, kesenian pun tak dapat mengelak dari sifat khas kebudayaan sebagai ungkapan diri manusia. Salah satu sifat khas kebudayaan adalah simbolisme, atau sifat simbolik tiap kebudayaan dan karena itu juga sifat simbolik tiap ekspresi kesenian. Sifat simbolik kebudayaan lahir dari kenyataan hubungan antara dunia alam pikiran manusia serta perwujudannya secara fisik, entah dalam tingkah laku sosial, atau dalam suatu hasil fisik kebudayaan, tidaklah bersifat kausal, fungsional atau linier, di mana nilai budaya dianggap menjadi sebab, sedangkan tingkah laku sosial dianggap sebagai akibat. Hubungan antara dunia alam pikiran dan perwujudannya secara fisik selalu bersifat simbolik dan karenanya juga bersifat ambivalen. Ambivalensi antara dunia alam pikiran dan perwujudannya secara fisik terjadi sekurang-kurangnya pada dua tingkat. Pertama, suatu tingkah laku sosial misalnya dapat mengungkapkan suatu nilai tetapi sekaligus juga dengan itu dapat menyembunyikan suatu nilai lain. Kedua, suatu tingkah laku sosial tidak selalu secara "lurus dan setia" mengungkapkan suatu nilai dalam alam pikiran seseorang, karena tingkah laku yang sama pada gilirannya dapat menyimpang dari dan "mengkhianati" nilai dalam alam pikiran dan kemudian mendorongnya berubah. Karena itu, suatu tingkah laku sosial dapat menjadi realisasi fisik nilai tertentu, tetapi juga sebaliknya, suatu nilai dapat menjadi terjemahan mental pola-pola tingkah laku sosial seseorang atau bahkan terjemahan mental pengalaman seseorang dengan dunia materil. Simbolisme ini bukanlah teori besar tetapi hal yang dapat diamati dalam kehidupan sehari-hari. Harmoni yang amat disanjung sebagai suatu sifat umum kebudayaan Indonesia misalnya, di satu pihak dapat mengungkapkan adanya kerukunan dan saling pengertian, tetapi di pihak lain dapat menjadi selubung yang menyembunyikan konflik, pertikaian atau bahkan dendam. Demikian pula halnya sifat tidak-berterus-terang. Di satu pihak terlihat sebagai ketakutan mengungkapkan kenyataan, tetapi dapat pula menyatakan apresiasi pada perasaan orang lain untuk tidak melukainya. Ia menyembunyikan kebenaran untuk menyatakan kebaikan. Simbolisme merupakan watak umum kebudayaan mana pun, dengan perbedaan apa yang diungkapkan dan apa yang disembunyikan masing-masing kebudayaan tidaklah sama.

KESENIAN dan hasil kesenian adalah suatu ekspresi kebudayaan yang mengungkapkan nilai keindahan. Gerak, bunyi, kata serta garis dan warna adalah perwujudan fisik nilai-nilai keindahan yang bergetar dalam diri sang seniman. Namun demikian, keindahan pada dasarnya bukanlah suatu nilai yang berdiri sendiri, tetapi berinteraksi terus-menerus dengan nilai kebudayaan dan nilai kehidupan lainnya. Bisa dikatakan keindahan adalah terjemahan estetis pengalaman kejiwaan, pengalaman sosial atau pengalaman keagamaan seseorang atau sekelompok orang. Seorang biasa akan mengucapkan doa dengan kalimat yang biasa atau bahkan dengan menggunakan rumusan doa yang tersedia, tetapi penyair seperti Sutardji Calzoum Bachri menyampaikannya dalam sajak mencekam. Demikian pun persoalan yang timbul karena berbagai kontradiksi sosial-ekonomi ditanggapi tidak hanya

oleh ahli politik dan analisis ekonomi tetapi juga oleh penyair, pelukis atau seniman lain. Hanya kalangan terakhir ini tidak menyampaikannya dalam rumus ilmu ekonomi tetapi melalui idiom estetika yang menjadi "bahasa" mereka. Sebuah contoh, yang saya ingat, adalah kumpulan sajak Agus R Sarjono berjudul *Kenduri Air Mata* (Forum Sastra Bandung, 1994). Metafor puisi yang dipakainya ternyata tidak hanya mempersonifikasikan alam tetapi juga gejala sosial atau bahkan gejala ekonomi. Tidak lagi diceritakan percakapan burung dan bulan atau awan dan matahari, tetapi percakapan penuh lambang antara buldozer dan pematang sawah yang harus pergi sebelum fajar pagi.

KOREOGRAFER Sardono menceritakan kepada saya pengalamannya berjumpa dengan tarian tradisional di berbagai daerah (Kalimantan, Flores, Bali, Iran). Tarian itu ternyata bukan sekadar olah-gerak tubuh untuk menghasilkan keindahan koreografis, tetapi juga terjemahan koreografis berbagai masalah ekonomi, sosial dan ekologis. Gerak jalan orang-orang suku Dani di Irian pada pagi atau sore hari ketika udara dingin, menurut Sardono, adalah embrio gerak tari yang amat dinamis. Kedua lengan disilangkan di dada dengan telapak tangan menggapai bahu, adalah gerak melindungi tubuh dari dingin udara, tetapi sekaligus juga dengan itu disiapkan awal tarian yang amat dinamis. Tarian adalah usaha melawan dingin, menghangatkan badan, memproduksi dan menyalurkan energi tubuh dan dengan demikian mengatasi keterbatasan yang ditentukan iklim dan cuaca. Menggali dan mendalami tarian tradisional, demikian Sardono, akan membantu menemukan kunci tentang bagaimana persoalan ekonomi, ekologi, masalah religius atau konflik kejiwaan suatu kelompok etnis mendapat pengungkapannya secara koreografis. Melihat suatu tarian berarti memahami struktur-dalam (*deep structure*) suatu masyarakat. Untuk memparafrasekan sebuah ucapan Geertz yang terkenal: tarian adalah cerita sekelompok orang tentang diri mereka melalui gerakan tubuh, dan inskripsi cerita tersebut tidak dalam huruf tetapi dalam gerak. Hal yang sama tentu saja dapat dikatakan tentang seni lukis, seni musik atau teater rakyat. Dengan demikian kesenian pada dasarnya mengungkapkan dua hal sekaligus. Pertama, keindahan itu sendiri (lukisan indah, musik bagus, atau sajak menggetarkan). Kedua, kesenian adalah terjemahan atau versi estetis pengalaman atau persoalan (religius, politik atau ekonomi) yang menyentuh dan menggugah sang seniman. Kesenian dan kreasi seni adalah respons estetis sang seniman pada persoalan yang masuk ke dalam medan-relevansi tanggapannya. Seniman, sama seperti anggota masyarakat lainnya, adalah orang-orang yang terkena persoalan masyarakatnya, merasakan akibatnya, mencoba memahami maknanya, dan kemudian memberikan responsnya. \*\*\*

SEJAUH menyangkut persoalan sosial, maka dipersoalkan sejauh mana kesenian berhubungan dengan kehidupan masyarakatnya. Di sini pun sekali lagi kelihatan hubungan yang penuh ambivalensi. Di satu pihak kesenian seakan menerjemahkan persoalan masyarakatnya ke dalam ungkapan artistik dan memberinya sofistikasi dan sublimasi estetis. Kesenian adalah bagian kehidupan sehari-hari. Di pihak lain kesenian menjadi saat orang mengambil jarak dari kehidupan sehari-hari, semacam cuti dari rutinitas sosial-budaya, dengan cara meremehkan hal-hal yang sehari-hari dianggap penting, dan memperlakukan sebagai penting dan bahkan merayakan hal-hal yang sehari-harinya tidak mempunyai fungsi langsung dalam kegunaan dan kepraktisan yang berhubungan dengan kebutuhan sehari-hari. Tidakkah mengherankan suatu karya seni betapa pun abstrak dan esoteriknya, akan mengandung *historical and social underpinning* dalam dirinya, yaitu watak kesejarahan atau

watak sosial dari tempat dan waktu di mana kesenian itu dihasilkan. Penghayatan suatu karya seni yang intens (apalagi bila dibantu metode hermeneutik kesenian yang tepat) akan selalu bisa menyingkap akar sosial dalam ekspresi seni. Pengungkapan akar sosial dalam kesenian tidak lagi tergantung pada niat seniman sendiri. Sebabnya, entah seorang seniman ingin dengan sadar mengungkapkannya, entah seniman itu tidak sengaja menyampaikannya, entah seniman itu secara sengaja ingin menghindari atau menyembunyikannya, watak sosial kesenian itu akan terungkap juga. Suatu ekspresi artistik, yang berhubungan dengan masalah kemasyarakatan, sangat tergantung dari proses budaya yang memungkinkan dan memantapkan hubungan itu. Bila kemudian suatu masalah sosial ditimpakan begitu saja pada ekspresi artistik yang ada, maka yang terjadi adalah semacam kekerasan estetik (*aesthetic violence*), di mana hubungan asli antara seni dan masalah sosialnya dihentikan begitu saja untuk menampung masalah sosial lain, yang barangkali asing untuk ekspresi artistik yang tersedia. Pada titik itu masalah sosial yang ditumpangkan tersebut kehilangan hubungan yang organis dengan ekspresi artistik yang tersedia. Sementara ekspresi artistik yang ada belum disiapkan melalui suatu proses budaya yang matang untuk menerjemahkan secara estetik masalah sosial yang barangkali tidak sesuai dengan idiom kesenian yang ada. Dengan demikian, hubungan antara ekspresi kesenian dan watak sosialnya adalah hubungan yang jauh lebih halus, peka, rumit dan canggih daripada sekadar hubungan antara bentuk dan isi atau wadah dan muatan. Ekspresi kesenian bukanlah bentuk yang dapat menampung atau menerima isi maupun titipan pesan apa saja. Dalam dialektik bentuk dan isi, bukan hanya bentuk menentukan isi tetapi juga sekaligus isi akan memilih dan menentukan bentuknya sendiri. Pada titik itu diperlukan semacam kritik seni yang, di samping mampu mendalami ekspresi artistik melalui disiplin estetika, sanggup pula menyingkapkan watak kebudayaan dan watak sosial kesenian yang dikaji melalui semacam hermeneutik kesenian. Persoalan adalah bagaimana membaca sebuah kesenian sebagai teks yang ditulis suatu masyarakat tentang diri mereka, dan mengapa pula suatu masyarakat menuliskan teks mereka dengan tipografi tertentu. Kritik seni seperti itu akan mengungkapkan pula bagaimana simbolisme ekspresi kesenian dapat dimanfaatkan berganda: dia dapat mengungkapkan persoalan secara artistik dan menyadarkan orang untuk menyelesaikannya, atau dia menyembunyikan persoalan yang sama di balik selubung estetik, dan menggantikan penyelesaian sosial dengan kepuasan estetik semata-mata. Kesenian adalah pernyataan diri secara estetik tetapi dapat juga menjadi pelarian estetik persoalan sosial. Kritik kesenian yang dapat menyingkapkan dilema tersebut, pada akhirnya bukanlah kritik estetik semata-mata tetapi sekaligus menjadi kritik kebudayaan dan kritik sosial. Simbolisme kesenian dan simbolisme kebudayaan, akhirnya juga menjadi simbolisme masyarakat. Persoalan sosial yang gagal diselesaikan secara sosial, masih selalu dapat diselesaikan secara simbolik, estetik dan artistik. Pada titik itu kesenian bukanlah ekspresi estetik kondisi masyarakatnya, tetapi substitusi estetik untuk kondisi masyarakatnya. Ternyata simbolisme kesenian menghasilkan dilemanya sendiri, yang penyelesaiannya sangat tergantung pada kondisi sosial masyarakatnya. Karena kesenian yang tidak mendapat kebebasan untuk mengungkapkan masalah sosial secara estetik, akhirnya akan menjadi semacam selubung estetik bersulam indah untuk menutupi bopeng dan buruk-rupa wajah masyarakatnya.

**Ignas Kleden,**  
Sosiolog